LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022.

Dengan telah tersusunnya LKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 ini, menunjukkan bahwa secara umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan tugas kegiatannya secara maksimal di tahun 2018.

Penyusunan LKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta ini telah dapat mencerminkan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta tahun 2018.

Jakarta, 4 Februari 2019
Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Budihastuti
NIP. 195903151985032005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 2

C. GAMBARAN UMUM 2

D. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR 4

E. KONDISI SAAT INI 7

F. KONDISI YANG DIHARAPKAN 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022 11

1. Visi 12

2. Misi 12

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPSDM 14

4. Strategi dan Arah Kebijakan 26

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 35

C. PERJANJIAN KINERJA 38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 39

B. EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI KINERJA 42

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 49

BAB IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
1	Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	21
2	Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi ke-3 RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	23
4	Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2018	36
5	Tabel 3.2 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional	37
6	Tabel 3.3 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial	38
7	Tabel 3.4 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural	38
8	Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi	39
9	Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja	40
10	Tabel 3.7 Indikator Kinerja Utama **"Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional"**	41
11	Tabel 3.8 Indikator Kinerja Utama **"Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial"**	43
12	Tabel 3.9 Indikator Kinerja Utama **"Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural"**	44
13	Tabel 3.10 Indikator Kinerja Utama **"Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi"**	46
14	Tabel 3.11 Persentase Alokasi Anggaran	47
15	Tabel 3.12 Persentase Alokasi Anggaran Per-Kegiatan **"Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional"**	47
16	Tabel 3.13 Persentase Alokasi Anggaran Per-Kegiatan **"Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial"**	49
17	Tabel 3.14 Persentase Alokasi Anggaran Per-Kegiatan **"Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural"**	49
18	Tabel 3.15 Persentase Alokasi Anggaran Per-Kegiatan **"Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi"**	51
19	Tabel 3.16 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	52
20	Tabel 3.17 Struktur Belanja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Th. 2018	58

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1	Gambar 2.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta	20
2	Gambar 2.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran dengan Strategi BPSDM	24
3	Gambar 2.3 Arah Tranformasi BPSDM 2017-2022	30

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Tersusunnya Laporan Kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk dapat melaksanakan tugas secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjadikan BPSDM Provinsi DKI Jakartra yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap pengembangan kompetensi ASN di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

C. GAMBARAN UMUM

Dengan restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

D. Tugas dan Fungsi serta Struktur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada Bab II Kedudukan, Tugas dan Fungsi. Pasal 2 bahwa BPSDM merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.

BPSDM menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai (perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, kurikulum, metode, materi berserta pengembangannya)
2. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, pemberian rekomendasi/standardisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh SKPD/UKPD.
3. Melaksanakan proram dan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai dan asesor serta pemberian sertifikat/surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
4. Menyusun kebijakan dan pengelolaan izin dan tugas belajar pegawai.
5. Menyusun standardisasi alat bantu pendidikan, standardisasi dan uji kompetensi teknis/fungsional pegawai.
6. Menyusun, mengelola dan melaksanakan sertifikasi dan seleksi profesi pegawai serta pengembangan pegawai.
7. Pemantauan evaluasi dan pelaporan/penyajian pemberdayaan pegawai alumni pendidikan, pelatihan, izin dan tugas belajar oleh SKPD/UKPD.
8. Pengembangan hubungan antar lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai

Struktur BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya dengan regulasi peraturan restrukturisasi organisasi semakin cepat maka berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Mengalami banyak perubahan sampai saat ini. Untuk lebih jelas bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat di bawah ini :

Bagan 1.1

Bagan Struktur Organisasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta

(sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 257 Tahun 2016)

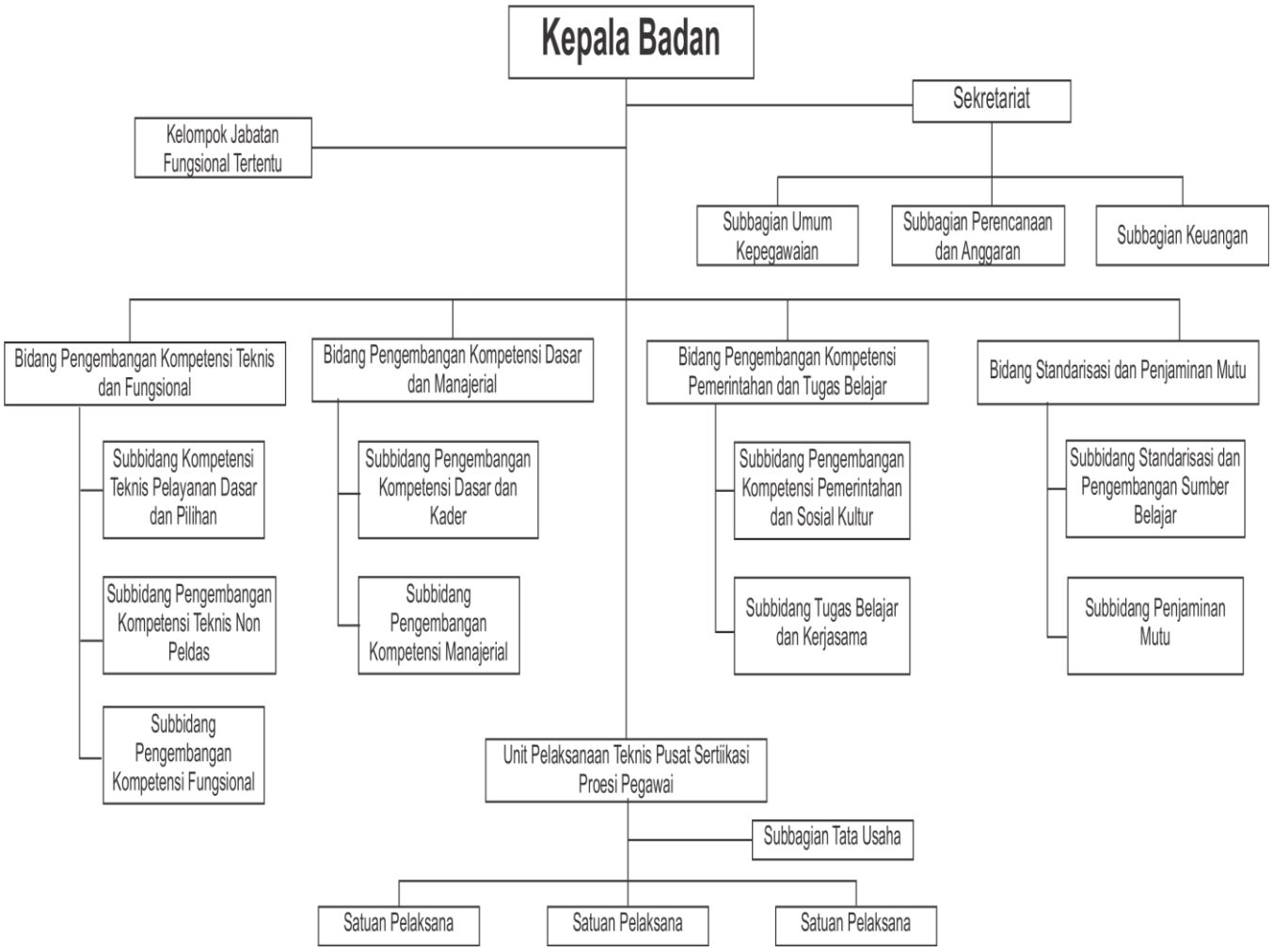

E. Beban, Tugas dan Tanggungjawab BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Terkait dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kewajiban BPSDM untuk peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan diri menjadi hak pegawai ASN. Oleh karena itu, untuk mendidik sebanyak ± 65.431 pegawai dimana setiap pegawai memiliki hak untuk mengembangkan diri selama 12 hari per tahun dan 5 hari digunakan untuk diklat.

F. Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

DKI Jakarta pada saat ini :

1) Sarana

Dukungan sarana harus terus ditingkatkan sebagai pendukung dalam proses pembelajaran baik kelas yang ada pada 2 tempat yaitu STIKES dan JIC (Jakarta Islamic Center) maupun administrasi yang ada di Gedung Abdul Muis Lt.6 dan Lt. 8 diharapkan kedepan pembangunan gedung BPSDM sudah dimulai karena sangat dibutuhkan untuk pengembangan BPSDM menjadi pusat pengembangan yang representatif.

2) Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia BPSDM cukup bagus namun perlu pengembangan dan peningkatan untuk menunjang tugas pokok dalam pelayanan kepada pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih cepat.

Rekapitulasi Jumlah Pegawai BPSDM Berdasarkan Jenis Kelamin - Desember 2018

Grafik 1.1

Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

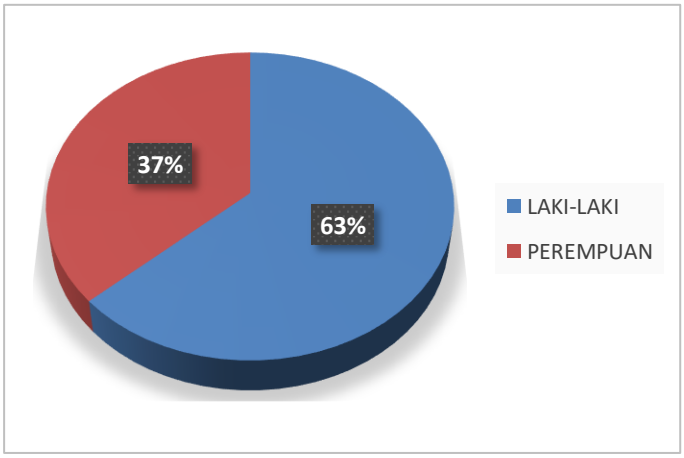

Keterangan :

1) Laki-laki 71 orang;
2) Perempuan 41 orang

Total pegawal 112 orang

Rekapitulasi Jumlah Pegawai BPSDM Berdasarkan Tingkat Golongan Desember 2018.

Grafik 1.2

Pegawai berdasarkan Golongan

Keterangan	Jumlah
Golongan I	3
Golongan II	13
Golongan III	59
Golongan IV	37
JUMLAH	**112**

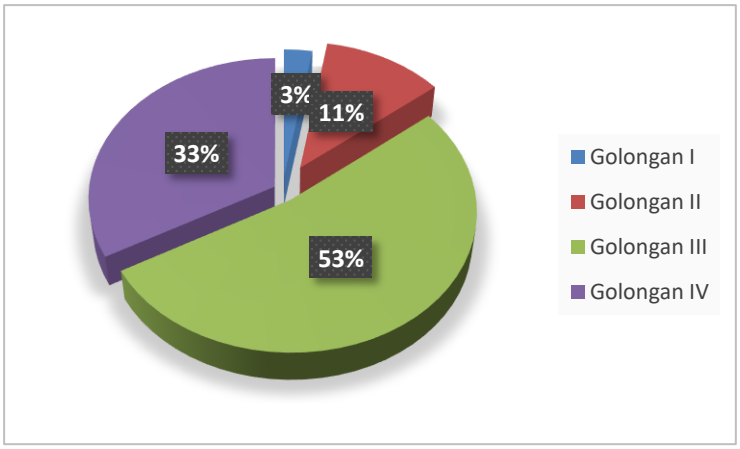

Rekapitulasi Jumlah Pegawai BPSDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan - Desember 2018

Grafik 1.3

Pegawai berdasarkan Pendidikan

Keterangan	Jumlah
SD	1
SLTP	2
SLTA	18
Diploma 3	8
Diploma 4	2
Strata 1	31
Strata 2	45
Strata 3	5
JUMLAH	**112**

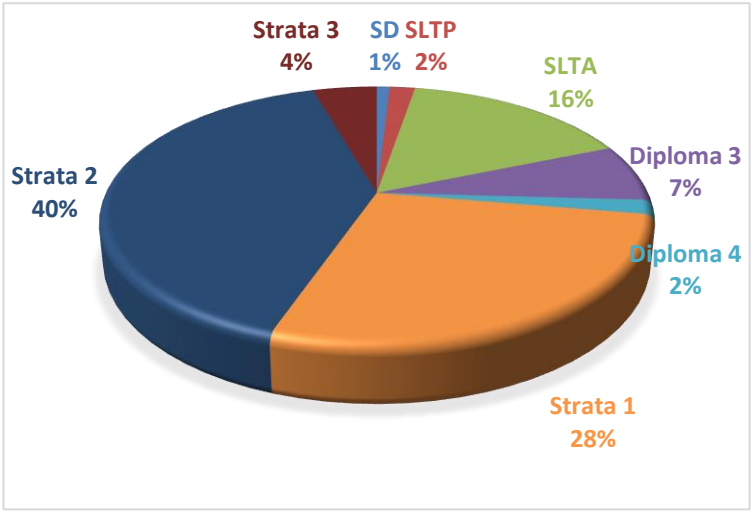

3) Tenaga Widyaiswara/Narasumber/Tenaga Ahli

Untuk tenaga widyaiswara/narasumber/tenaga ahli yang menguasai terhadap teknologi pembelajaran dan mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang selalu dinamis sesuai tuntutan zaman.

Rekapitulasi Jumlah Widyaiswara BPSDM Berdasarkan Jabatan Fungsional - Desember 2018

Grafik 1.4

Widyaiswara berdasarkan Jabatan Fungsional

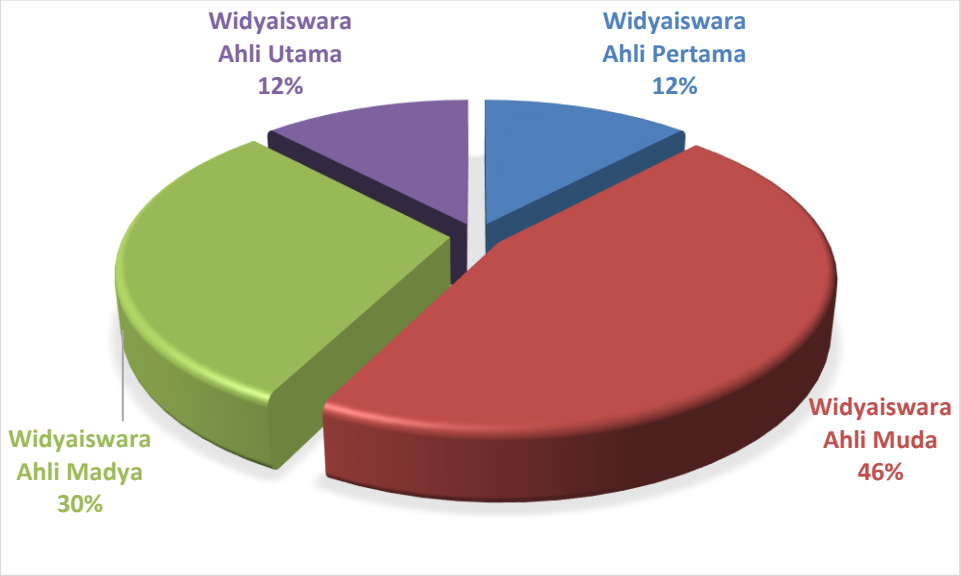

Keterangan	Jumlah
Widyaiswara Ahli Pertama	4
Widyaiswara Ahli Muda	15
Widyaiswara Ahli Madya	10
Widyaiswara Ahli Utama	4
JUMLAH	**33**

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017–2022 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–2022.

1. Visi

Visi RPJMD DKI Jakarta 2017-2022: “Jakarta Kota Maju, Lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”.

Untuk itulah, salah satu upaya terpenting dalam menyiapkan SDM aparatur yang tangguh, sebagaimana tecermin dalam **Misi III RPJMD DKI Jakarta 2017-2022: “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas”.** Atas misi ketiga RPJMD dimaksud maka peran dan kedudukan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung operasionalisasinya sangat sentral.

Sebagai kesinambungan dari berbagai upaya atau transformasi yang telah dilakukan di masa-masa lalu, BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kualitas berbagai jenis layanannya melalui visi BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yaitu “**Sebagai pusat pengembangan kompetensi untuk mewujudkan SDM yang profesional, bermoral dan bertaraf internasional**.”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Misi BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017– 2022 sebagai berikut :

1. Mengembangkan kompetensi SDM yang menitikberatkan pada pengembangan karakter.
2. Mengembangkan uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
3. Mengembangkan penyelenggaraan diklat yang profesional dan lembaga bertaraf internasional.

Berpijak pada visi dan misi tersebut serta dilandasi nilai-nilai budaya kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yaitu: profesional, integritas, komitmen, inovatif, dan kerjasama, BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus bertranformasi

untuk menjadi lembaga pengembang kompetensi yang bertaraf internasional dengan terus melakukan reformasi di segala aspek layanan dan peningkatan kapasitas kelembagaan guna meningkatkan keunggulan kompetitifnya.

3. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPSDM

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan BPSDM yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis di bidang pengembangan SDM. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Dalam perencanaan strategis, perumusan tujuan dan sasaran merupakan bagian tak terpisahkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh BPSDM dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya dalam lima tahun. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro (indikator tujuan) dan sasaran spesifik perangkat daerah sebagai arsitektur kinerja '*impact'* yang saling terhubung dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan BPSDM yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian kinerja BPSDM.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 berdasarkan tujuan tersebut di atas merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian integral dalam proses perencanaan bidang pengembangan SDM pegawai. Sasaran juga menjadi dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Mengacu pada tugas dan fungsi BPSDM serta visi dan misi pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 sebagaimana telah dijelaskan di atas maka **tujuan BPSDM tahun 2017-2022** diuraikan sebagai berikut.

1. **Mewujudkan SDM aparatur berintegritas yang mempunyai kompetensi sebagai agen perubahan, penggerak partisipasi warga, melayani warga dan menyelesaikan permasalahan Jakarta**

   Tuntutan terhadap peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur birokrasi merupakan proses untuk mewujudkan desentralisasi yang efisien, pemerintahan demokratis dan pelayanan publik yang berkualitas mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kesuksesan reformasi birokrasi ditentukan oleh kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah daerah. Sedangkan birokrasi yang baik didasarkan pada perwujudan perilaku aparatur birokrasi yang berintegritas dan profesional. Maka dari itu, prinsip integritas dan profesionalisme muncul

sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi aparatur birokrasi, sebab tanpa prinsip tersebut tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produktivitas yang tinggi dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi. Berdasarkan penjelasan diatas, penetapan strategi yang tepat dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkup BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan sesuatu yang sangat urgent dan relevan untuk segera dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut maka kebijaksanaan pengembangan SDM pegawai birokrasi harus diproyeksikan pada kemampuan dan atau pengetahuan umum (*general knowledge*), teknis spesifik (*technical knowledge*), pengorganisasi tugas/pekerjaan (*job organizing*), wawasan administrasi (*administrative concept),* serta kemauan untuk selalu melakukan pengenalan diri *(self knowledge*). Aparatur yang memiliki perilaku (*attitude*) dan atau ketertarikan (*interest*) dalam hal-hal: sikap percaya diri (*self confidence*), berorientasi pada tindakan (*action eoriented*), dorongan untuk selalu meningkatkan kualitas diri, serta sikap tanggung jawab (r*esponsibility*) sangat dibutuhkan dalam memodernisasi lembaga. Selain itu, standarisasi profesionalisme pada aparatur birokrasi juga harus berdasarkan dengan prinsip *the right man on the right place*.

Dalam rangka meningkatkan integritas dan profesionalisme, aparatur birokrasi harus dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti prinsip keterbukaan (*transparancy*) dan akuntabilitas (*accountability*). Keterbukaan dapat diartikan bahwa aparatur birokrasi adalah bagian dari masyarakat, yang berintegrasi dengan masyarakat serta memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Oleh karena itu, BPSDM harus dapat membuat pegawai menjadi **penggerak partisipasi warga, melayani warga agar dapat menyelesaikan permasalahan Jakarta**. Pertama, birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Pengalaman banyak negara menunjukan bahwa untuk berhasilnya pembangunan, partisipasi rakyat amat diperlukan. Partisipasi rakyat pada lapisan bawah (*grassroots*) yang efektif adalah apabila diselenggarakan secara bersama dalam lingkup kelompok-kelompok masyarakat (*local comunities*). Bentuk dan cara partisipasi seperti itu akan

menghasilkan sinergi dan manfaat baik ekonomi, sosial maupun politik yang dapat dinikmati oleh semua orang yang ikut serta di dalamnya. Sudah menjadi tugas birokrasi termasuk BPSDM untuk dapat membuat pegawai mampu merangsang partisipasi serta kegiatan kelompok masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang maju dan mandiri.

Upaya meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai dilaksanakan agar pegawai dapat mengemban tugas pokoknya secara lebih baik, sebab hanya dengan demikian pegawai akan memperoleh kredibilitas, legalitas, akuntanbilitas dan wibawanya sehingga senantiasa, akan dekat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Perbaikan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan akan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja serta kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pegawai di lingkup Provinsi DKI Jakarta. Pada akhirnya reformasi birokrasi menjadi sukses, sehingga desentralisasi yang efisien dapat terwujud. perbaikan-perbaikan sistem promosi aparatur birokrasi, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparatur birokrasi.

Kinerja dalam organisasi dilakukan oleh segenap sumber daya manusia, baik unsur pimpinan maupun pekerja. Peningkatan kompetensi harus didukung oleh tingkat pendidikan pegawai, spesialisasi (*skill*), pengalaman kerja dan sikap kerja yang dimiliki oleh pegawai. Adapun faktor yang mendukung peningkatan kinerja adalah menyangkut kapasitas kelembagaan, antara lain sarana dan prasarana kerja. Dalam meningkatkan kinerja pegawai, harus didukung oleh semua komponen dan kompetensi pegawai dalam menumbuhkan kemauan dan keinginan dari setiap pegawai untuk melakukan perubahan menyangkut sikap dan perilaku yang diimplementasikan sebagai suatu hasil kerja yang baik. Dalam rangka merealisasikan harapan tersebut, maka kebijakan yang diambil tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pimpinan, yaitu meningkatkan kinerja dan kompetensi SDM pegawai. Pentingnya kompetensi pegawai dalam lingkup Provinsi DKI Jakarta dipandang dapat mendukung peningkatan kinerja

pegawai dan memberikan kontribusi dalam menentukan masa depan Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan **Mewujudkan SDM aparatur berintegritas yang mempunyai kompetensi sebagai agen perubahan, penggerak partisipasi warga, melayani warga dan menyelesaikan permasalahan Jakarta** ini dijabarkan kedalam 2 sasaran sebagai berikut:

a. Terwujudnya SDM pimpinan tinggi, adminstrator & pengawas yang berintegritas serta mampu menyelesaikan permasalahan Jakarta
b. Tersertifikasinya aparatur

2. **Mewujudkan kelembagaan pengembangan SDM aparatur sebagai barometer pengembangan kompetensi**

Pengembangan kelembagaan didefinisikan sebagai proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Memerhatikan permasalahan dan isu strategis serta tuntutan layanan di masa datang maka peningkatan kapasitas kelembagaan diarahkan pada terwujudnya layanan BPSDM yang berstandar global. Pengembangan kelembagaan menyangkut sistem manajemen, termasuk pemantauan dan evaluasi, perencanaan, struktur organisasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Kelembagaan lebih dipandang sebagai suatu manajemen dan keterkaitan antara sumber daya manusia, keuangan dan hubungan atau sistem kerja antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya.

Kelembagaan BPSDM harus dikembangkan agar kinerja pelayanan dapat berlangsung efisien dan menjadi barometer pengembangan kompetensi dengan derajat rasionalitas yang tinggi. Aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi harga mati dalam pengembangan kelembagaan BPSDM. Akuntabilitas dan transparansi tidak hanya menyodorkan takaran harga kinerja lembaga pemerintah tetapi juga menjadi cermin tingkat independensinya. Independensi (kemandirian) lembaga memiliki modal utama berupa kejelasan identitas lembaga yang bersangkutan beserta tujuan dan tugas-tugas strategis yang harus dikerjakan sehingga suatu lembaga

tersebut memiliki sejumlah koridor sebagai bahan kontrol dan antisipasi dari segenap potensi penyimpangan. Kejelasan tujuan dan tugas strategis juga mempermudah dalam menyusun prioritas kerja secara mandiri.

Tujuan ke dua yakni **Mewujudkan kelembagaan pengembangan SDM aparatur sebagai barometer pengembangan kompetensi,** dicapai melalui penentapan sasaran "Terselenggaranya pelayanan pengembangan kompetensi SDM Aparatur yang berkualitas."

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan BPSDM yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis di bidang pengembangan SDM. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Dalam perencanaan strategis, perumusan tujuan dan sasaran merupakan bagian tak terpisahkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh BPSDM dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya dalam lima tahun. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro (indikator tujuan) dan sasaran spesifik perangkat daerah sebagai arsitektur kinerja '*impact'* yang saling terhubung dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan BPSDM yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian kinerja BPSDM.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 berdasarkan tujuan tersebut di atas merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian integral dalam proses perencanaan bidang pengembangan SDM pegawai. Sasaran juga menjadi dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Mengacu pada tugas dan fungsi BPSDM serta visi dan misi pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 sebagaimana telah dijelaskan di atas maka **tujuan BPSDM tahun 2017-2022** diuraikan sebagai berikut.

3. **Mewujudkan SDM aparatur berintegritas yang mempunyai kompetensi sebagai agen perubahan, penggerak partisipasi warga, melayani warga dan menyelesaikan permasalahan Jakarta (Indikator tujuan: indeks profesionalisme ASN)**

Tuntutan terhadap peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur birokrasi merupakan proses untuk mewujudkan desentralisasi yang efisien, pemerintahan demokratis dan pelayanan publik yang berkualitas mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kesuksesan reformasi birokrasi ditentukan oleh kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah daerah. Sedangkan birokrasi yang baik didasarkan pada perwujudan perilaku aparatur birokrasi yang berintegritas dan profesional. Maka dari itu, prinsip integritas dan profesionalisme muncul

sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi aparatur birokrasi, sebab tanpa prinsip tersebut tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produktivitas yang tinggi dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi. Berdasarkan penjelasan diatas, penetapan strategi yang tepat dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkup BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan sesuatu yang sangat urgent dan relevan untuk segera dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut maka kebijaksanaan pengembangan SDM pegawai birokrasi harus diproyeksikan pada kemampuan dan atau pengetahuan umum (*general knowledge*), teknis spesifik (*technical knowledge*), pengorganisasi tugas/pekerjaan (*job organizing*), wawasan administrasi (*administrative concept),* serta kemauan untuk selalu melakukan pengenalan diri *(self knowledge*). Aparatur yang memiliki perilaku (*attitude*) dan atau ketertarikan (*interest*) dalam hal-hal: sikap percaya diri (*self confidence*), berorientasi pada tindakan (*action eoriented*), dorongan untuk selalu meningkatkan kualitas diri, serta sikap tanggung jawab (r*esponsibility*) sangat dibutuhkan dalam memodernisasi lembaga. Selain itu, standarisasi profesionalisme pada aparatur birokrasi juga harus berdasarkan dengan prinsip *the right man on the right place*.

Dalam rangka meningkatkan integritas dan profesionalisme, aparatur birokrasi harus dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti prinsip keterbukaan (*transparancy*) dan akuntabilitas (*accountability*). Keterbukaan dapat diartikan bahwa aparatur birokrasi adalah bagian dari masyarakat, yang berintegrasi dengan masyarakat serta memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Oleh karena itu, BPSDM harus dapat membuat pegawai menjadi **penggerak partisipasi warga, melayani warga agar dapat menyelesaikan permasalahan Jakarta**. Pertama, birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Pengalaman banyak negara menunjukan bahwa untuk berhasilnya pembangunan, partisipasi rakyat amat diperlukan. Partisipasi rakyat pada lapisan bawah (*grassroots*) yang efektif adalah apabila diselenggarakan secara bersama dalam lingkup kelompok-kelompok masyarakat (*local comunities*). Bentuk dan cara partisipasi seperti itu akan

menghasilkan sinergi dan manfaat baik ekonomi, sosial maupun politik yang dapat dinikmati oleh semua orang yang ikut serta di dalamnya. Sudah menjadi tugas birokrasi termasuk BPSDM untuk dapat membuat pegawai mampu merangsang partisipasi serta kegiatan kelompok masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang maju dan mandiri.

Upaya meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai dilaksanakan agar pegawai dapat mengemban tugas pokoknya secara lebih baik, sebab hanya dengan demikian pegawai akan memperoleh kredibilitas, legalitas, akuntanbilitas dan wibawanya sehingga senantiasa, akan dekat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Perbaikan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan akan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja serta kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pegawai di lingkup Provinsi DKI Jakarta. Pada akhirnya reformasi birokrasi menjadi sukses, sehingga desentralisasi yang efisien dapat terwujud. perbaikan-perbaikan sistem promosi aparatur birokrasi, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparatur birokrasi.

Kinerja dalam organisasi dilakukan oleh segenap sumber daya manusia, baik unsur pimpinan maupun pekerja. Peningkatan kompetensi harus didukung oleh tingkat pendidikan pegawai, spesialisasi (*skill*), pengalaman kerja dan sikap kerja yang dimiliki oleh pegawai. Adapun faktor yang mendukung peningkatan kinerja adalah menyangkut kapasitas kelembagaan, antara lain sarana dan prasarana kerja. Dalam meningkatkan kinerja pegawai, harus didukung oleh semua komponen dan kompetensi pegawai dalam menumbuhkan kemauan dan keinginan dari setiap pegawai untuk melakukan perubahan menyangkut sikap dan perilaku yang diimplementasikan sebagai suatu hasil kerja yang baik. Dalam rangka merealisasikan harapan tersebut, maka kebijakan yang diambil tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pimpinan, yaitu meningkatkan kinerja dan kompetensi SDM pegawai. Pentingnya kompetensi pegawai dalam lingkup Provinsi DKI Jakarta dipandang dapat mendukung peningkatan kinerja

pegawai dan memberikan kontribusi dalam menentukan masa depan Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan **Mewujudkan SDM aparatur berintegritas yang mempunyai kompetensi sebagai agen perubahan, penggerak partisipasi warga, melayani warga dan menyelesaikan permasalahan Jakarta** ini dijabarkan kedalam 2 sasaran sebagai berikut:

a. Terwujudnya SDM pimpinan tinggi, adminstrator & pengawas yang berintegritas serta mampu menyelesaikan permasalahan Jakarta
b. Tersertifikasinya aparatur

4. **Mewujudkan kelembagaan pengembangan SDM aparatur sebagai barometer pengembangan kompetensi**

Pengembangan kelembagaan didefinisikan sebagai proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Memerhatikan permasalahan dan isu strategis serta tuntutan layanan di masa datang maka peningkatan kapasitas kelembagaan diarahkan pada terwujudnya layanan BPSDM yang berstandar global. Pengembangan kelembagaan menyangkut sistem manajemen, termasuk pemantauan dan evaluasi, perencanaan, struktur organisasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Kelembagaan lebih dipandang sebagai suatu manajemen dan keterkaitan antara sumber daya manusia, keuangan dan hubungan atau sistem kerja antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya.

Kelembagaan BPSDM harus dikembangkan agar kinerja pelayanan dapat berlangsung efisien dan menjadi barometer pengembangan kompetensi dengan derajat rasionalitas yang tinggi. Aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi harga mati dalam pengembangan kelembagaan BPSDM. Akuntabilitas dan transparansi tidak hanya menyodorkan takaran harga kinerja lembaga pemerintah tetapi juga menjadi cermin tingkat independensinya. Independensi (kemandirian) lembaga memiliki modal utama berupa kejelasan identitas lembaga yang bersangkutan beserta tujuan dan tugas-tugas strategis yang harus dikerjakan sehingga suatu lembaga

tersebut memiliki sejumlah koridor sebagai bahan kontrol dan antisipasi dari segenap potensi penyimpangan. Kejelasan tujuan dan tugas strategis juga mempermudah dalam menyusun prioritas kerja secara mandiri.

Tujuan ke dua yakni **Mewujudkan kelembagaan pengembangan SDM aparatur sebagai barometer pengembangan kompetensi,** dicapai melalui penentapan sasaran "Terselenggaranya pelayanan pengembangan kompetensi SDM Aparatur yang berkualitas."

Adapun hubungan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai langkah pemfokusan dalam penyelenggaraan pelayanan BPSDM adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2017-2022

Visi Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua
MISI 3 RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas
Tujuan 1, MISI 3 RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
Sasaran MISI 3 RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur
VISI BPSDM Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 Sebagai pusat pengembangan kompetensi untuk mewujudkan SDM yang profesional, bermoral dan bertaraf internasional
MISI BPSDM Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 1. Mengembangkan kompetensi SDM yang menitikberatkan pada pengembangan karakter. 2. Mengembangkan uji kompetensi dan sertifikasi profesi. 3. Mengembangkan penyelenggaraan diklat yang profesional dan lembaga bertaraf internasional.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
1. Mewujudkan SDM aparatur berintegritas yang mempunyai kompetensi sebagai agen perubahan, penggerak partisipasi warga, melayani warga dan menyelesaikan permasalahan Jakarta. (Indikator tujuan: indeks profesionalitas ASN dimensi kompetensi)	1. Terwujudnya SDM pimpinan tinggi, administrator & pengawas yang berkompeten serta mampu menyelesaikan permasalahan Jakarta	Indeks Profesionalitas ASN dimensi kompetensi
2. Mewujudkan kelembagaan pengembangan SDM aparatur sebagai barometer pengembangan kompetensi. (Indikator tujuan: Rata-rata nilai Kepuasan Peserta Diklat dan Pegawai Tugas Belajar)	1. Terselenggaranya pelayanan pengembangan kompetensi SDM Aparatur yang berkualitas	Rata-rata Nilai Kepuasan Peserta Diklat dan Pegawai Tugas Belajar

Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Tahun ke-					Kondisi Akhir 2022
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Mewujudkan SDM aparatur berintegritas yang mempunyai kompetensi sebagai agen perubahan, penggerak partisipasi warga, melayani warga dan menyelesaikan permasalahan Jakarta. (indikator tujuan: indeks profesionalisme ASN)								
	- Terwujudnya SDM pimpinan tinggi, adminstrator & pengawas yang berintegritas serta mampu menyelesaikan permasalahan Jakarta	Indeks Profesionalitas ASN dimensi kompetensi	89,01%	32,40 %	33,20 %	34,00 %	34,80 %	36,00 %	36,00%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Tahun ke-					Kondisi Akhir 2022
				2018	2019	2020	2021	2022	
2.	Mewujudkan kelembagaan pengembangan SDM aparatur sebagai barometer pengembangan kompetensi (indikator tujuan: Nilai Rata-rata Kepuasan Peserta Diklat)								
	- Terselenggaranya pelayanan pengembangan kompetensi SDM Aparatur yang berkualitas	Rata-rata Nilai Kepuasan Peserta Diklat dan Pegawai Tugas Belajar	92,23%	92,50 %	93,00 %	93,50 %	94,00 %	94,50 %	94,50%

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pada dasarnya adalah upaya sinergis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan BPSDM dan dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD. Strategi untuk mencapai tujuan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dihasilkan dari hasil analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threath*) untuk memahami peta kekuatan dan kelemahan lingkungan internal dan eksternal. Strategi dan arah kebijakan juga dirumuskan dengan memerhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas (analisis) permasalahan dan isu strategis tugas dan fungsi BPSDM dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM Aparatur DKI Jakarta. Di samping itu, strategi dan arah kebijakan juga diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD, khususnya yang berhubungan dengan reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan integritas dan perbaikan layanan aparatur.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi ke-3 RPJMD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

Tujuan RPJMD Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	
Sasaran RPJMD	
Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	
Strategi	**Arah Kebijakan**
1. Pemetaan kompetensi SDM petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. 2. Mengembangkan sistem kinerja manajemen ASN. 3. Mewujudkan jiwa korps anggota KORPRI DKI Jakarta. **4. Peningkatan kompetensi SDM.** 5. Peningkatan mutu penyelenggaraan pengembangan SDM.	1. Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta: a. Pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi b. Kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi serta pemantapan apresiasi

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

Dengan memerhatikan strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 di atas dan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, dirumuskan strategi Renstra BPSDM Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur; dan
2. Optimalisasi Dukungan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi Berstandar Global.

Kedua strategi tersebut merupakan representasi dari tugas dan fungsi BPSDM yang diselenggarakan oleh seluruh bidang dan sekretariat di lingkungan BPSDM dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran dengan Strategi BPSDM

1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur

Guna mengantisipasi setiap tantangan dan tuntutan pelayanan publik aparatur DKI Jakarta maka peran pengembangan kompetensi menjadi sangat strategis, melalui berbagai jenis kediklatan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan sebagainya; termasuk sertifikasi profesi SDM. Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik. Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas pengembangan kompetensi SDM Aparatur dimaksudkan agar penyelenggaraan, antara lain, diklat di lingkungan BPSDM semakin dapat memenuhi kebutuhan (pengembangan) kompetensi pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam volume atau kapasitas layanan disertai peningkatan mutu yang semakin baik (*excellent*).

Hal paling mendesak dari perbaikan kinerja bidang pengembangan kompetensi adalah bagaimana meningkatkan kapasitas layanan berupa

peningkatan peserta diklat di berbagai jenis diklat yang diselenggarakan maupun peningkatan jenis diklat itu sendiri sesuai kebutuhan dari waktu ke waktu, terdiri dari (yang sudah ada):

a. Pengembangan Kompetensi Manajerial; meliputi: Diklat Kepemimpinan Tingkat I; *Reform Leader Academy*; Diklat Kepemimpinan Tingkat II; Diklat Kepemimpinan Tingkat III; Diklat Kepemimpinan Tingkat IV; dan Diklat Manajerial lainnya.
b. Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional; meliputi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan beberapa penunjang urusan pemerintahan. Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Tertentu dilaksanakan melalui Diklat Fungsional, yaitu diklat pembentukan jabatan fungsional dan diklat penjenjangan jabatan fungsional.
c. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan; yaitu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh Pegawai di setiap OPD. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan terpusat di BPSDM.
d. Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural; adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk memperkuat kompetensi sesuai dengan fungsi pekerjaannya. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan terpusat di BPSDM.

Untuk meningkatkan kompetensi dalam jabatan tersebut di lingkungan BPSDM Provinsi DKI Jakarta ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran, magang, pertukaran pegawai dengan swasta, bimbingan teknis, sosialisasi, tugas belajar, *workshop* dan *coaching* untuk setiap jajaran dalam struktur organisasi BPSDM. Pengembangan kompetensi ini dilakukan untuk menambah kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pegawai yang profesional sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing. Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai harus dibuktikan dengan sertifikasi profesi yang kemudian digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Proses pengembangan karir dalam

suatu pendekatan formal yang diambil organisasi untuk memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia pada saat dibutuhkan. Sehingga pengembangan karir dapat dikatakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan status seseorang dalam organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan strategi BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan, dirumuskan sebagai berikut:

a. Optimalisasi pemetaan kebutuhan diklat dan target rekrutmen peserta diklat;
b. Peningkatan mutu penyelenggaraan pengembangan SDM;
c. Adanya kerja sama pengembangan kompetensi SDM dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan dan Sektor Publik;
d. Penetapan standar kompetensi pada seluruh jabatan (JFT dan non JFT); dan
e. Peningkatan kualitas uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

2. Optimalisasi Dukungan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi Berstandar Global

Agar pengembangan kompetensi menghasilkan SDM aparatur (alumni diklat) yang semakin profesional dalam mengemban tugas dan fungsi organisasi di masing-masing OPD maka bidang pengembangan kompetensi harus didukung dengan kapasitas kelembagaan yang berstandar tinggi, termasuk upaya-upaya penjaminan mutunya. Strategi optimalisasi dukungan kelembagaan dan peningkatan mutu pengembangan kompetensi berstandar global pada dasarnya dimaksudkan untuk menghantarkan layanan BPSDM berkelas internasional (*government university)*.

Manajemen SDM harus dilakukan secara profesional. BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebagai unit kerja yang bertugas melakukan peningkatan kompetensi pegawai, harus menyelenggarakan kebijakan

peningkatan kapasitas kelembagaan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan motivasi, penyegaran dan pengembangan kompetensi dan kapasitas serta meningkatkan kualitas pelayanan sebagai abdi negara di lingkungan BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Peningkatan standarisasi dan penjaminan mutu dimaksudkan untuk dapat mendukung layanan yang diselenggarakan oleh bidang pengembangan kompetensi melalui perbaikan prosedur perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang standarisasi penjaminan mutu agar peserta diklat dapat direktrut semakin banyak dengan pengerahan sumber daya organisasi yang semakin efisien. Upaya-upaya dimaksud juga termasuk memanfaatkan seoptimal mungkin kearifan teknologi informasi dalam seluruh tahapan pengelolaaan diklat (termasuk pelaksanaan), mulai dari persiapan, pendaftaran hingga diklat berakhir. Untuk terus mengenali berbagai area perbaikan atau peningkatan kualitas diklat, hal penting yang dilakukan adalah terus memperbaiki atau mengefektifkan monitoring dan evaluasi, tidak saja pada keseluruhan proses penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM melalui bidang-bidang pengembangan, tak kalah penting juga memantau dampak diklat terhadap kinerja dan perbaikan layanan pegawai DKI Jakarta.

Upaya atau dukungan lain yang tak kalah penting dalam pengembangan kapasitas lembaga yaitu rangkaian upaya meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk menjadi organisasi yang efektif, dan efisien, termasuk upaya-upaya berkelanjutan agar BPSDM menjadi institusi pengembang SDM berskala internasional. Pengembangan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaan individu dan organisasi serta mengharuskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang perumusan strategi dan program BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kapasitas kelembagaan dalam hal ini mencakup infrastruktur, teknologi, sumber daya keuangan, pengetahuan, kepemimpinan strategis, program, manajemen, jaringan dan hubungan dengan organisasi lain serta proses yang digunakan organisasi

tersebut untuk mencapai tujuannya. Kapasitas lembaga pada akhirnya akan memengaruhi kinerja organisasi tersebut. Dengan adanya pengembangan kapasitas lembaga pengembangan SDM diharapkan kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta akan menjadi lebih baik dan mampu mengatasi permasalahan perangkat daerah serta pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu hal yang terpenting dalam pemberdayaan kapasitas kelembagaan adalah menyangkut aspek kepegawaian, dimana kondisi pembinaan pola karier aparatur saat ini tidak didasarkan pada standar kompetensi, baik persyaratan umum, persyaratan manajerial, dan persyaratan teknis, sehingga berdampak kurang positif terhadap kinerja instansi serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. Pembentukan kelembagaan perangkat daerah, dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, kebijakan yang diambil salah satunya adalah menjadikan UPT PSPP menjadi BLUD.

Dari segenap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan BPSDM, hal paling mendesak dan menjadi urgent adalah penyediaan gedung diklat terpadu yang hingga saat ini masih belum terwujud; yang antara lain adalah untuk meningkatkan tampungan peserta dalam bentuk penambahan kelas, asrama, dan lain-lain. Penyediaan gedung terpadu dimaksud juga secara langsung menjadi pemicu kinerja widyaiswara agar dapat menjalankan tugas dan fungsi menjadi lebih baik karena antara lain perpindahan ruang mengajar dari satu acara kelas ke kelas berikutnya menjadi lebih efisien.

Arah kebijakan dari strategi kedua Renstra BPSDM sebagaimana dijelaskan di atas, dapat diringkas sebagai berikut:

a. Meningkatkan standarisasi dan penjaminan mutu, dengan rincian:

- Perbaikan prosedur perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang standarisasi penjaminan mutu;
- Perbaikan standar manajemen mutu penyelenggaraan diklat;
- Peningkatan kualitas dan sertifikasi TOT Widyaiswara;
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi kediklatan dan

integrasinya dengan sistem informasi kepegawaian;

- Optimalisasi wadah penyebaran pengetahuan dalam bentuk *knowledge management;*
- Optimalisasi pendayagunaan alumni diklat dalam proses pembelajaran; dan
- Perbaikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi diklat, termasuk dampaknya bagi alumni diklat dalam penyelenggaraan urusan dan pelayanan publik.

b. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan BPSDM berstandar global, dengan rincian:

- Perbaikan prosedur perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang standarisasi penjaminan mutu;
- Meningkatkan kualitas SDM BPSDM dalam pengembangan kompetensi dan pelayanan (prima) kediklatan;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, termasuk penyediaan gedung penyelenggaraan diklat terpadu;
- Penguatan budaya organisasi BPSDM dalam penyelenggaraan diklat dan layanan prima; dan
- Menjadikan UPT PSPP menjadi BLUD.

Dua arah kebijakan besar di atas yang di urai dalam berbagai kebijakan teknis masing-masing, dalam implementasinya selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan diurai dalam suatu arah transformasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan atas apa yang sudah dilakukan pada tahapan atau pelaksanaan renstra sebelumnya, sebagaimana ditunjukan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.3
Arah Tranformasi BPSDM 2017-2022

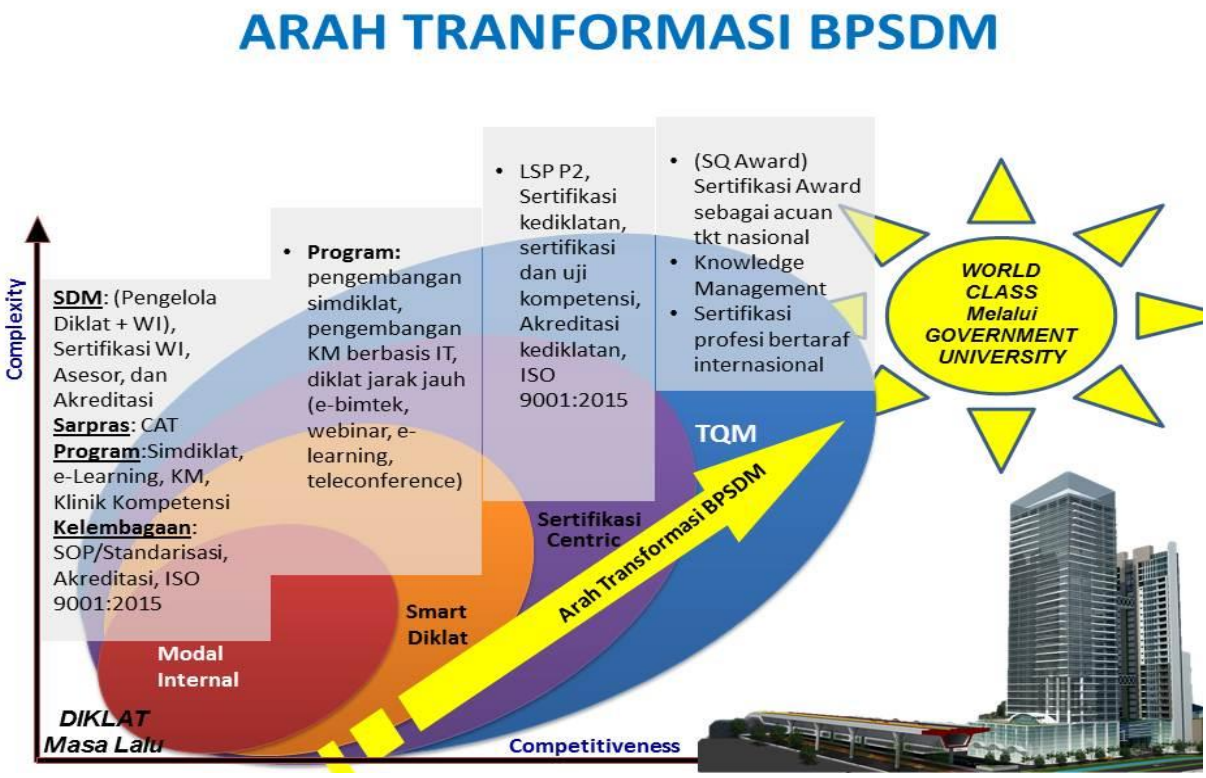

Melihat segala sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tampak pada gambar di atas dapat dipastikan BPSDM Provinsi DKI Jakarta mampu mewujudkan pusat pengembangan kompetensi yang bertaraf internasional (*world class* melalui *government university*). Pada gambar tersebut tampak pula bahwa kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus meningkat pesat, mulai dari diklat masa lalu yang sederhana kemudian dikembangkan sedemikian rupa dengan segala modal internal yang dimiliki (SDM: Pengelola Diklat + WI; Sertifikasi WI, Asesor, dan Akreditasi; Sarpras: CAT, Asrama, R.Kelas, R.Inovasi; Program: prioritas SC dan CB; Kelembagaan: SOP/Standarisasi Struktur organisasi) menjadikan BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadi *smart* diklat melalui berbagai pelaksanaan diklat berbasis IT (SIM Diklat: pendaftaran, *e-coaching*, Cop; E-evaluasi; Metode IT based; Diklat jarak jauh (e-*learning*). Keberhasilan ini didukung pula dengan diperolehnya sertifikasi centric melalui pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi jabatan negeri (2016); LSP 1 (2017);

usulan kebijakan karier pelaksana; (SQ Award) Sertifikasi Award sebagai acuan tingkat nasional serta pengembangan *knowledge management*.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementrian / Lembaga di Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah.

Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Daerah, di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018. Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2018 Badan Penggembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2018
BPSDM Provinsi DKI Jakarta

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Mewujudkan SDM aparatur berintegritas yang mempunyai kompetensi sebagai agen perubahan, penggerak partisipasi warga, melayani warga	Terwujudnya SDM pimpinan tinggi, administrator & pengawas yang berintegrasi serta mampu menyelesaikan	Jumlah peserta diklat capacity building	150 orang
		Jumlah peserta diklat hukum konstruksi	30 orang
		Jumlah peserta diklat pengawas Konstruksi	30 orang
		Jumlah peserta diklat manajemen BLUD	120 orang
		Jumlah peserta diklat manajemen bencana	90 orang
		Jumlah peserta diklat manajemen sekolah(e-learning)	300 orang

dan menyelesaikan permasalahan Jakarta.	permasalahan Jakarta	Jumlah peserta diklat penataan ruang daerah	60 orang
Mewujudkan kelembagaan pengembangan SDM aparatur sebagai barometer pengembangan kompetensi.	Terselenggaranya pelayanan pengembangan kompetensi SDM Aparatur yang berkualitas	Jumah peserta diklat dasar PolPP bagi Staf	120 orang
		Jumlah peserta diklat pelayanan terpadu satu pintu (e-learning)	300 orang
		Jumlah peserta diklat pengelolaan barang daerah	600 orang
		Jumlah peserta diklat bendahara pengeluaran	420 orang
		Jumlah peserta diklat bendahara penerimaan	30 orang
		Jumlah peserta diklat pengiriman PPNS	150 orang
		Jumlah peserta diklat training of courses	30 orang
		Jumlah peserta diklat penulisan karya tulis ilmiah bagi widyaiswara	30 orang
		Jumlah peserta diklat teknis pertanahan	300 orang
		Jumlah peserta diklat keretaapi perkotaan	60 orang
		Jumlah peserta diklat pengiriman kediklatan	177 orang
		Jumlah peserta diklat pengelolaan arsip dinamis	30 orang
		Jumllah peserta diklat komunikasi publik	30 orang
		Jumlah peserta diklat pengelolaan dan pelaporan keuangan berbasis akrual	150 orang
		Jumlah peserta diklat manajemen SDM (e-learning)	300 orang
		Jumlah peserta diklat manajemen perencanaan pembangunan daerah (e-learning)	300 orang
		Jumlah peserta diklat teknis perundang-undangan	150 orang
		Jumlah peserta diklat pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta estate manajemen (blended e-learning)	300 orang
		Jumlah peserta diklat system pengendalian internal pemerintah	90 orang
		Jumlah peserta diklat pengelolaan penaatausahaan keuangan	90 orang
		Jumlah peserta diklat pelayanan prima (e-learning)	300 orang
		Jumlah peserta diklat keprotokolan	150 orang
		Jumlah peserta diklat bina damai	150 orang
		Jumlah peserta diklat penyelesaian sengketa hukum	90 orang
		Jumlah peserta diklat revolusi mental	150 orang
		Jumlah peserta kerjasama kediklatan	450 orang
		Jumlah seleksi pegawai tugas belajar	300 orang
		Jumlah penyusunan kurikulum diklat	3 jenis kurikulum
		Jumlah penyusunan modul diklat	18 modul diklat
		Jumlah pengelolaan system informasi BPSDM	1 paket

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Jumlah pengembangan e-learning	5 jenis modul diklat
		Jumlah akreditasi kediklatan	4 jenis kediklatan
		Jumlah penyusunan analisa kesenjangan kompetensi (TNA)	1 dok.
		Jumlah penjaminan mutu dan SMM ISO 9001:2015	4 jenis
		Jumlah Knowledge Management	5 jenis
		Jumlah pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi profesi	800 orang
		Jumlah penyusunan standard kompetensi jabatan dalam rangka sertifikasi profesi	4 standar kompetensi jabatan
		Jumlah pelaksanaan klinik kompetensi	5 jenis
		Jumlah pengiriman pegawai tugas belajar	125 orang
		Jumlah peserta diklat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan ujian serrtifikasi	450 orang
		Jumlah penyusunan rencana strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta 2018-2022	1 dok.
		Jumlah peserta diklat dasar kereta api perkotaan	60 orang
		Jumlah peserta diklat kepemimpinan tingkat III	150 orang
		Jumlah peserta diklat kepemimpinan tingkat IV	300 orang
		Jumlah peserta diklat prajabatan golongan I, II dan III (K1/K2)	2520 orang
		Jumlah peserta diklat teknis pelayanan terpadu penyandang Disabilitas	300 orang
		Jumlah penyediaan alat tuliis kantor	19 jenis
		Jumlah sewa mesin, foto copy	5 jenis
		Jumlah Penyediaan jasa telepon, air, listrik dan internet (TALI)	12 bulan
		Juumlah pengadaan barang pakai habis penunjang pendidikan dan pelatihan	8 jenis
		Jumlah pengadaan jasa pencucian linen	3 jenis
		Jumlah pengadaan modal penunjang pendidikan dan pelatihan	114 jenis
		Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	3 jenis
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	1 paket
		Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan	2 jenis
		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8 jenis
		Jumlah Penyediaan jasa pengadaan perlengkapan keamanan kantor	19 orang
		Jumlah Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	25 orang
		Jumlah Penyediaan alat tulis kantor penyelenggaraan diklat	21 jenis

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Jumlah Penyediaan jasa bidang teknis dan penunjang	4 orang
		Jumlah Penyediaan BBM KDO/KDO khusus	9000 liter 1440 liter
		Jumlah Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	12 unit
		Jumlah pemeliharaan KDO/KDO khusus	12 unit

C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2018 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Pada Tanggal 21 April 2014 terbit Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai gantinya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 serta ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 20 Nopember 2014, yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Kinerja Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IndIkator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat

Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun rincian pengukuran kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Miningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional	38,70%	38,70 %	100%
		Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial	54,58%	54,58 %	100%
		Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural	33,73%	33,54 %	99,44 %
		Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi	33,77%	34,11 %	101,01 %
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%
		Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	100%	100%	100%
		Penyampaian laporan fungsional bendahara pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase progress tertib administrasi pengelolaan asset/barang inventaris OPD	100%	100%	100%
		Jumah updating data strategis OPD pada portal data Jakarta sesuai tugas dan fungsi	20 dataset	20 dataset	100%

Pada tabel diatas akan dijabarkan secara rinci pada indikator kinerja kegiatan Pengukuran program indikator kinerja **"Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional"** didukung oleh beberapa indikator kegiatan antara lain :

Tabel 3.2.

Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah peserta Diklat Hukum Konstruksi	30	30	100%
2	Jumlah peserta Diklat Pengawas Konstruksi	30	30	100%
3	Jumlah peserta Diklat Manajemen BLUD	120	120	100%
4	Jumlah peserta Diklat Manajemen Bencana	90	90	100%
5	Jumlah peserta Diklat Manajemen Sekolah (e-learning)	300	300	100%
6	Jumlah peserta Diklat Penataan Ruang Daerah	60	60	100%
7	Jumlah peserta Diklat Dasar PolPP bagi Staf	120	120	100%
8	Jumlah peserta Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (e-learning)	300	300	100%
9	Jumlah peserta Diklat Pengelolaan Barang Daerah	600	600	100%
10	Jumlah peserta Diklat Bendahara Pengeluaran	420	420	100%
11	Jumlah peserta Diklat Bendahara Penerimaan	30	30	100%
12	Jumlah peserta Diklat Pengiriman PPNS	150	150	100%
13	Jumlah peserta Diklat Training of Courses	30	30	100%
14	Jumlah peserta Diklat Penulisan Karya Tullis Ilmiah bagi Widyaiswara	30	30	100%
15	Jumlah peserta Diklat Teknis Pertanahan	300	300	100%
16	Jumlah peserta Diklat Perkeretaapian Perkotaan	90	90	100%
17	Jumlah peserta Pengiriman Kediklatan	177	177	100%
18	Jumlah peserta Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis	30	30	100%
19	Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan	60	60	100%
20	Jumlah peserta Diklat Komunikasi Publik	30	30	100%
21	Jumlah peserta Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas	20	20	100%

Sebagaimana pada tabel di atas ada 21 indikator kegiatan dengan target peserta 3.017 orang dengan realisasi 3.017 orang dengan capaian 100% dinyatakan bahwa indikator kinerja kegiatan telah mendukung indikator kinerja program

Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional.

Pengukuran program indikator kinerja **"Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial"** didukung oleh beberapa indikator kegiatan antara lain :

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah peserta Diklat Capacity Building	150	150	100%
2	Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III	150	150	100%
3	Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	300	300	100%
4	Jumlah peserta Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III (K1/K2)	2520	2520	100%

Sebagaimana pada tabel di atas ada 4 indikator kinerja kegiatan dengan target peserta 3.120 orang dengan realisasi 3.120 orang dengan capaian 100% dinyatakan bahwa indikator kinerja kegiatan telah mendukung indikator kinerja program Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial.

Pengukuran program indikator kinerja **"Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural"** didukung oleh beberapa indikator kegiatan antara lain :

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah peserta Diklat Pengeleloan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual	150	150	100%
2	Jumlah peserta Diklat Manajemen SDM (e-learning)	300	300	100%
3	Jumlah peserta Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah(e-learning)	300	300	100%
4	Jumlah peserta Diklat Teknis Perundang-undangan	150	150	100%

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Jumlah peserta Diklat Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta Estate Manajemen (Blended e-learning)	300	300	100%
6	Jumlah peserta Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	90	90	100%
7	Jumlah peserta Diklat Pengelolaan Penatausahan Keuangan	90	90	100%
8	Jumlah peserta Diklat Pelayanan Prima (e-learning)	300	300	100%
9	Jumlah peserta Diklat Keprotokolan	150	150	100%
10	Jumlah peserta Diklat Bina Damai	150	150	100%
11	Jumlah peserta Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum	90	90	100%
12	Jumlah peserta Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi	450	450	100%
13	Jumlah peserta Diklat Revolusi Mental	150	150	100%
14	Jumlah peserta Kerjasama Kediklatan	750	750	100%
15	Jumlah peserta Seleksi Pegawai Tugas Belajar	300	216	72%
16	Jumlah peserta Pengiriman Pegawai Tugas Belajar	101	101	100%

Sebagaimana pada tabel di atas ada 16 indikator kinerja kegiatan dengan target peserta 3.821 orang dengan realisasi 3.737 orang dengan capaian 99,44% dinyatakan bahwa indikator kinerja kegiatan telah mendukung indikator kinerja program Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural.

Pengukuran program indikator kinerja **“Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi”** didukung oleh beberapa indikator kegiatan antara lain :

Tabel 3.5

Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi	800	814	101,01%

Sebagaimana pada tabel di atas ada 1 indikator kinerja kegiatan dengan target peserta 800 orang dengan realisasi 814 orang dengan capaian 101,01% dinyatakan

bahwa indikator kinerja kegiatan telah mendukung indikator kinerja program Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi.

B. EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI KINERJA

Pengukuran kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional	38,70%	-	38,70%
		Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial	54,58%	-	54,58%
		Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural	33,73%	-	33,54%
		Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi	33,77%	-	34,11%

Pada tanggal 09 Mei 2017 berakhirnya kepemimpinan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Tjahya Purnama kemudian dilanjutkan oleh Bapak Djarot Saeful Hidayat pada tanggal 15 Juni s.d. 15 Oktober 2017. Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Gubernur baru yaitu Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga S. Uno serta berakhirnya juga RPJMD 2013-2017, sehingga menyusun kembali Visi, Misi dan Rencana Strategis serta RPJMD 2017 – 2022.

Untuk mengetahui peningkatan maupun penurunan indikator kinerja program sebagaimana tersebut di atas dapat kami diuraikan dibawah ini :

Tabel 3.7

1) Indikator Kinerja Utama **"Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional**"

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional	38,70%	-	38,70%
		Jumlah peserta diklat manajemen BLUD	120	120	120
		Jumlah peserta diklat pengelolaan barang daerah	600	90	600
		Jumlah peserta diklat bendahara pengeluaran	420	90	420
		Jumlah peserta diklat teknis training of fasilitator	30	30	-
		Jumlah peserta diklat pengawas sekolah	90	90	-
		Jumlah peserta pengiriman kediklatan	177	163	177
		Jumlah peserta diklat pengiriman ppns	150	30	150
		Jumlah peserta diklat hukum konstruksi	30	-	30
		Jumlah peserta diklat pengawas konstruksi	30	-	30
		Jumlah peserta diklat manajemen bencana	90	-	90
		Jumlah peserta diklat manajemen sekolah (e-leaarning)	300	300	300
		Jumlah peserta diklat penataan ruang daerah	60	-	60
		Jumlah peserta diklat dasar pol PP bagi staf	120	-	120
		Jumlah peserta diklat pelayanan terpadu satu pintu (e-learning)	300	300	300
		Jumlah peserta diklat Bendahara Penerimaan	30	-	30

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018
		Jumlah peserta diklat training of courses	30	-	30
		Jumlah peserta diklat penulisan karya tullis Iimiah bagi widyaiswara	30	-	30
		Jumlah peserta diklat Teknis pertanahan	300	-	300
		Jumlah peserta diklat perkeretaapian perkotaan	90	-	90
		Jumlah peserta diklat pengelolaan arsip dinamis	30	-	30
		Jumlah peserta diklat dasar kereta api perkotaan	60	-	60
		Jumlah peserta diklat komunikasi publik	30	-	30
		Jumlah peserta diklat teknis pelayanan terpadu penyandang disabilitas	300	-	300

Berdasarkan tabel tersebut di atas salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) mengenai "**Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional"** untuk keberhasilan indikator tersebut didukung oleh beberapa indikator kegiatan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi akhir tahun 2018, dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah direncanakan, terdiri dari 21 kegiatan yang diikuti oleh 3,297 orang peserta yang sudah memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, keseluruhan indikator kinerja peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional berhasil dilaksanakan dan tercapai. Faktor tercapaianya al. sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, pengajar/tenaga ahli/narasumber yang berkopeten, rekrutment peserta melalui *web.bpsdm.jakarta.go.id* serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Walaupun telah tercapai ada juga beberapa kendala yang dihadapai yaitu BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki gedung secara representative, jarak tempat pembelajaran dengan kantor sangat jauh.

Pada Tahun 2018 mengalami kenaikan kegiatan mencapai 14 kegiatan hal ini disebabkan BPSDM Provinsi DKI Jakarta salah satu perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan visi dan misi Gubernur, terutama pada misi ke-3 "**Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara**

yang berkarya, mengabdi, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, metitokratis dan berintegritas".

Tabel 3.8

2) Indikator Kinerja Utama **"Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial**"

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018
1		**Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial**	**54,58%**	**-**	**54,58%**
		Jumlah peserta diklat capacity building	150	-	150
		Jumlah peserta Diklat kepemimpinan Tk. III	150	30	150
		Jumlah peserta diklat kepemimpinan TK. IV	300	60	300
		Jumlah peserta diklat prabatan golongan I dan II (K1/K2)	2190	2190	-
		Jumlah peserta diklat prajabatan golongan III (K1/K2)	2520	3210	2520

Pada tabel di atas Indikator Kinerja Utama mengenai "**Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial**" pada akhir kegiatan tahun 2018 telah berhasil dilaksanakan dan tercapai target, dengan 4 kegiatan yang diikuti oleh 3,120 orang peserta yang sudah memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Dibandingkan dengan Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2017, kegiatan 2018 berkurang 1 diklat yaitu prajabatan golongan I dan II (K1/K2) karena untuk prajabatan golongan I dan II telah diselesaikan pada Tahun 2017.

Khusus untuk indikator kinerja kegiatan diklat kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV waktu pelaksanaanya panjang dengan waktu 93 hari kerja untuk pim tingkat III dan 97 hari kerja untuk pim tingkat IV karena sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LAN RI No 12 dan 13 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat. III dan Tingkat IV*, kemudian diklat tersebut peserta diwajibkan membuat proyek perubahan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas pada Indikator kinerja No.1 untuk Faktor tercapaianya al. sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, pengajar/tenaga ahli/narasumber yang berkompeten, rekrutment peserta melalui *web.bpsdm.jakarta.go.id* serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Walaupun telah tercapai ada juga beberapa kendala yang dihadapai yaitu BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki gedung secara representatif, jarak tempat pembelajaran dengan kantor sangat jauh.

Pada indikator ini merupakan bagian yang memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan visi dan misi Gubernur, terutama pada misi ke-3 "**Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, metitokratis dan berintegritas**".

Tabel 3.9

3) Indikator Kinerja Utama **"Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural**"

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018
1		**Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural**	**33,73%**	**-**	**33,53%**
		Jumlah peserta diklat pengelolaan dan pelaporan keuangan berbasis akrual	150	90	150
		Jumlah peserta diklat pengelolaan penatausahaan keuangan	90	150	90
		Jumlah peserta pengiriman pegawai tugas belajar	101	149	101
		Jumlah peserta diklat pelayanan prima	300	120	300
		Jumlah peserta diklat teknis pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta estate manajemen	300	90	300
		Jumlah peserta diklat sistem pengendalian intern pemerintah	90	60	90

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018
		Jumlah peserta diklat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan ujian sertifikasi	450	150	450
		Jumlah peserta diklat teknis perundang-undangan	150	90	150
		Jumlah peserta diklat penyelesaian sengketa hukum	90	90	90
		Jumlah peserta diklat manajemen perencanaan pembangunan daerah(e-learning)	300	90	300
		Jumlah peserta diklat manajemen SDM(e-learning)	300	-	300
		Jumlah peserta diklat keprotokolan	150	-	150
		Jumlah peserta diklat bina damai	150	-	150
		Jumlah peserta diklat revolusi mental	150	300	150
		Jumlah peserta kerjasama kediklatan	750	300	750
		Jumlah peserta seleksi pegawai tugas belajar	300	120	216

Pada tabel di atas indikator kinerja utama mengenai "**Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural**" dengan 16 jenis kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti oleh 3.737 orang peserta yang lulus diklat dengan memiliki kompetensi. Faktor keberhasilan tentunya didukung antara lain sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, pengajar/tenaga ahli/narasumber yang berkopeten, rekrutment peserta melalui *web.bpsdm.jakarta.go.id* serta dukungan sarana dan prmasarana yang memadai, walaupun telah tercapai tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta yaitu belum memiliki gedung tersendiri utamanya untuk proses pembelajaran.

Indikator kinerja tersebut ada satu indikator kinerja kegiatan tidak tercapai target yaitu jumlah peserta seleksi pegawai tugas belajar. Kedepan, penekanan untuk mengikuti seleksi tugas belajar akan lebih optimal disosialisasikan. Dengan mendorong kepala perangkat daerah untuk memberikan motivasi terhadap pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui tugas belajar.

Pada indikator ini merupakan bagian yang memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan visi dan misi Gubernur, terutama pada misi ke-3 "**Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, metitokratis dan berintegritas**"

Tabel 3.10

4) Indikator Kinerja Utama **"Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi**"

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018
		Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi	**33,77%**	**-**	**34,11%**
		Jumlah peserta pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi profesi	800	640	814

Pada Indikator Kinerja Utama mengenai "Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi" telah mencapai target rencana sebanyak 800 orang peserta yang mengikuti pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi profesi, jumlah tersebut meningkat sebesar 27% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017.
Adapun yang dijadikan target uji kompetensi dan sertifikasi antara lain:.

1. Dinas Kesehatan (484 org);
2. Pol PP (118 org);
3. PTSP (180 org);
4. Bendahara Pengeluaran (14 org);
5. Calon Asesor Kompetensi (18 org).

Kenaikan disebabkan adanya uji kompetensi dan sertifikasi terhadap 14 orang bendahara pengeluaran.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

a. Alokasi per sasaran pembangunan

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel di bawah ini disajikan

alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran ataupun urusan :

Tabel 3.11

Persentase Alokasi Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	Prosentase (%)
1	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Pesentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional	11.975.972.500	87,21
		Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial	15.235.981.080	84,16
		Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural	18.858.059.500	80,62
		Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi	987.758.000	92,32

Pada uraian tabel tersebut di atas dapat dijabarkan terhadap indikator kinerja al. :

1) **“Pesentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional”** pada indikator kinerja kegiatan al. :

Table 3.12

Persentase Alokasi Anggaran Per-Kegiatan

NO.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	PERSENTASE
1	Pesentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional	Jumlah peserta diklat manajemen BLUD	141.015.000	92,21
		Jumlah peserta diklat manajemen sekolah(e-learning)	168.113.000	93,54
		Jumlah peserta diklat pengelolaan barang daerah	819.650.500	81,04
		Jumlah peserta diklat bendahara pengeluaran	659.318.500	88,27
		Jumlah peserta diklat pengawas konstruksi	50.116.500	92,59

NO.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	PERSENTASE
		Jumlah peserta pengiriman kediklatan	2.348.292.500	85,66
		Jumlah peserta diklat pengiriman ppns	3.315.191.500	92,65
		Jumlah peserta Diklat Hukum Konstruksi	51.116.500	91,76
		Jumlah peserta Diklat Manajemen Bencana	93.376.500	95,37
		Jumlah peserta Diklat Penataan Ruang Daerah	96.151.500	96,08
		Jumlah peserta Diklat Dasar Pol PP bagi Staf	853.361.500	83,36
		Jumlah peserta Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (e-learning)	170.763.000	94,24
		Jumlah peserta Diklat Bendahara Penerimaan	53.913.500	89,41
		Jumlah peserta Diklat Training of Courses	59.903.500	93,62
		Jumlah peserta Diklat Penulisan Karya Tullis Ilmiah bagi Widyaiswara	51.539.500	94,02
		Jumlah peserta Diklat Teknis Pertanahan	294.749.500	95,67
		Jumlah peserta Diklat Perkeretaapian Perkotaan	616.993.500	98,23
		Jumlah peserta Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis	38.166.500	84,59
		Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan	817.555.000	92,32
		Jumlah peserta Diklat Komunikasi Publik	60.256.500	98,03
		Jumlah peserta Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas	1.204.520.500	64,99

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase penyerapan anggaran rata-rata di atas 90%., sehingga dapat mendukung pengembangan kompetensi terhadap indikator kinerja Pesentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional. Adapun sisanya adalah sisa lelang pengadaan barang dan jasa.

2) **“Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial”** pada indikator kinerja kegiatan al. :

Table 3.13

Persentase Alokasi Anggaran Per-Kegiatan

NO.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	PERSENTASE
1	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial	Jumlah peserta diklat capacity building	706.780.000	89,35
		Jumlah peserta Diklat kepemimpinan Tk. III	2.578.743.000	85,45
		Jumlah peserta diklat kepemimpinan TK. IV	4.015.308.000	81,38
		Jumlah peserta diklat prabatan golongan I, II dan III (K1/K2)	7.937.150.000	84,68

Melihat pada tabel di atas diketahui bahwa persentase penyerapan anggaran rata-rata 85,21%., sehingga dapat mendukung pengembangan kompetensi terhadap indikator kinerja Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial. Adapun sisanya adalah sisa lelang pengadaan barang dan jasa.

.

3) **“Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural”** pada indikator kinerja kegiatan al. :

Table 3.14

Persentase Alokasi Anggaran Per-Kegiatan

NO.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	PERSENTASE
1	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural	Jumlah peserta diklat pengelolaan dan pelaporan keuangan berbasis akrual	198.671.500	96,22
		Jumlah peserta diklat pengelolaan penatausahaan keuangan	66.697.500	95,91
		Jumlah peserta pengiriman pegawai tugas belajar	15.383.597.500	78,05

NO.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	PERSENTASE
		Jumlah peserta diklat pelayanan prima	170.763.000	96,84
		Jumlah peserta diklat teknis pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta estate manajemen(blended e-learning)	315.261.500	90,41
		Jumlah peserta diklat sistem pengendalian intern pemerintah	106.159.500	96,01
		Jumlah peserta diklat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan ujian sertifikasi	611.161.500	97,82
		Jumlah peserta diklat teknis perundang-undangan	346.811.500	95,52
		Jumlah peserta diklat penyelesaian sengketa hukum	130.597.500	98,26
		Jumlah peserta diklat manajemen perencanaan pembangunan daerah(e-learning)	170.763.000	96,84
		Jumlah peserta diklat manajemen SDM(e-learning)	170.763.000	96,84
		Jumlah peserta diklat keprotokolan	274.461.500	92,98
		Jumlah peserta diklat bina damai	145.941.500	95,78
		Jumlah peserta diklat revolusi mental	448.541.500	80,27
		Jumlah peserta kerjasama kediklatan	147.886.500	97,06
		Jumlah peserta seleksi pegawai tugas belajar	169.981.500	59,99

Melihat pada tabel di atas diketahui bahwa persentase penyerapan anggaran rata-rata 91,55%., sehingga dapat mendukung pengembangan kompetensi terhadap indikator kinerja Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural. Adapun sisanya adalah sisa lelang pengadaan barang dan jasa.

4) Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi pada indikator kinerja kegiatan al. :

Table 3.15

Persentase Alokasi Anggaran Per-Kegiatan

NO.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	PERSENTASE
1	Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi	Jumlah peserta pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi profesi	987.758.000	92,30

Melihat pada table di atas diketahui bahwa persentase penyerapan anggaran rata-rata 92,30%., sehingga dapat mendukung pengembangan kompetensi terhadap indikator kinerja Persentase Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi. Adapun sisanya adalah sisa lelang pengadaan barang dan jasa.

b. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran.

Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.16
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(6-9)
1	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	**Pesentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional**	**38,70%**	**38,70%**	**100**	**11.975.972.500**	**10.444.385.821**	**87,21**	**12,79**
		Jumlah peserta Diklat Hukum Konstruksi	30	30	100	51.116.500	46.905.000	91,76	8,24
		Jumlah peserta Diklat Pengawas Konstruksi	30	30	100	50.116.500	46.405.000	92,59	7,41
		Jumlah peserta Diklat Manajemen BLUD	120	120	100	152.923.000	141.015.000	92,21	7,79
		Jumlah peserta Diklat Manajemen Bencana	90	90	100	93.376.500	89.055.000	95,37	4,63
		Jumlah peserta Diklat Manajemen Sekolah (e-leaarning)	300	300	100	168.113.000	157.250.000	93,54	6,46
		Jumlah peserta Diklat Penataan Ruang Daerah	60	60	100	96.151.500	92.380.000	96,08	3,92
		Jumlah peserta Diklat Dasar PolPP bagi Staf	120	120	100	853.361.500	711.340.000	83,36	16,64

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(6-9)
		Jumlah peserta Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (e-learning)	300	300	100	170.763.000	160.925.000	94,24	5,76
		Jumlah peserta Diklat Pengelolaan Barang Daerah	600	600	100	819.650.500	664.222.000	81,04	18,96
		Jumlah peserta Diklat Bendahara Pengeluaran	420	420	100	659.318.500	581.962.500	88,27	11,73
		Jumlah peserta Diklat Bendahara Penerimaan	30	30	100	53.913.500	48.205.000	89,41	10,59
		Jumlah peserta Diklat Pengiriman PPNS	150	150	100	3.315.191.500	3.071.580.000	92,65	7,35
		Jumlah peserta Diklat Training of Courses	30	30	100	59.903.500	56.080.000	93,62	6,38
		Jumlah peserta Diklat Penulisan Karya Tullis Ilmiah bagi Widyaiswara	30	30	100	51.539.500	48.455.000	94,02	5,98
		Jumlah peserta Diklat Teknis Pertanahan	300	300	100	294.749.500	281.985.000	95,67	4,33
		Jumlah peserta Diklat Perkeretaapian Perkotaan	90	90	100	817.555.000	754.795.000	92,32	7,68
		Jumlah peserta Pengiriman Kediklatan	177	177	100	2.348.292.500	2.011.512.321	85,66	14,34
		Jumlah peserta Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis	30	30	100	38.166.500	32.285.000	84,59	15,41
		Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan	60	60	100	616.993.500	606.090.000	98,23	1,77
		Jumlah peserta Diklat Komunikasi Publik	30	30	100	60.256.500	59.070.000	98,03	1,97

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(6-9)
		Jumlah peserta Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas	20	20	100	1.204.520.500	782.869.000	64,99	35,01
2		**Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial**	**54,58%**	**54,58%**	**100**	**15.235.981.090**	**12.822.309.350**	**,84,16**	**15,84**
		Jumlah peserta diklat capacity building	150	150	100	704.780.080	629.720.150	89,35	10,65
		Jumlah peserta Diklat kepemimpinan Tk. III	150	150	100	2.578.743.000	2.203.416.400	85,45	14,55
		Jumlah peserta diklat kepemimpinan TK. IV	300	300	100	4.015.308.000	3.267.626.300	81,38	18,62
		Jumlah peserta diklat prabatan golongan I, II dan III (K1/K2)	2520	2.520	100	7.937.150.000	6.721.546.500	84,68	15,32
3		**Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural**	**33,73%**	**33,54%**	**99,54**	**18.858.059.500**	**15.203.375.194**	**80,62**	**18,92**
		Jumlah peserta diklat pengelolaan dan pelaporan keuangan berbasis akrual	150	150	100	198.671.500	191.155.000	96,22	3,78
		Jumlah peserta diklat pengelolaan penatausahaan keuangan	90	90	100	66.697.500	63.969.000	95,91	4,09
		Jumlah peserta pengiriman pegawai tugas belajar	101	101	100	15.383.597.500	12.007.290.197	78,05	21,95

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(6-9)
		Jumlah peserta diklat pelayanan prima	300	300	100	170.763.000	165.360.000	96,84	3,16
		Jumlah peserta diklat teknis pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta estate manajemen(blended e-learning)	300	300	100	315.261.500	285.015.000	90,41	9,59
		Jumlah peserta diklat sistem pengendalian intern pemerintah	90	90	100	106.159.500	101.922.000	96,01	3,99
		Jumlah peserta diklat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan ujian sertifikasi	450	450	100	611.161.500	597.840.000	97,82	2,18
		Jumlah peserta diklat teknis perundang-undangan	150	150	100	346.811.500	331.265.000	95,52	4,48
		Jumlah peserta diklat penyelesaian sengketa hukum	90	90	100	130.597.500	128.319.000	98,26	1,74
		Jumlah peserta diklat manajemen perencanaan pembangunan daerah(e-learning)	300	300	100	170.763.000	165.360.000	96,84	3,16
		Jumlah peserta diklat manajemen SDM(e-learning)	300	300	100	170.763.000	165.360.000	96,84	3,16
		Jumlah peserta diklat keprotokolan	150	150	100	274.461.500	255.190.000	92,98	7,02
		Jumlah peserta diklat bina damai	150	150	100	145.941.500	139.785.000	95,78	4,22

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(6-9)
		Jumlah peserta diklat revolusi mental	150	150	100	448.541.500	360.045.000	80,27	19,73
		Jumlah peserta kerjasama kediklatan	750	750	100	147.886.500	143.534.997	97,06	2,94
		Jumlah peserta seleksi pegawai tugas belajar	300	216	100	169.981.500	101.965.000	59,99	40,01
4		**Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi**	**33,77 %**	**34,77 %**	**101,01**	**987.758.000**	**911.747.450**	**92,30**	**8,70**
		Jumlah peserta pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi profesi	800	814	101,01	987.758.000	911.747.450	92,30	8,70

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada beberapa indikator kinerja program **"persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi"** memiliki tingkat efisiensinya paling rendah.

1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berdampak positif terhadap hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua Undang-undang tersebut, juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan lebih dahulu, yaitu :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara nampak bahwa terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statement*).

Anggaran kinerja sangat memperhatian *time value of money*, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan, yang terdiri dari *input*, *output dan out comes*.

a. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya, dari sisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 46.951.292.000,- terealisasi sebesar Rp 44.596.214.264,- Belanja Langsung dari alokasi sebesar Rp 56.807.199.846,- terealisasi sebesar Rp 47.844.784.870,-.

Tabel 3.17 Struktur Belanja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Kategori Belanja	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (%)
BL	56.807.199.846	47.844.784.870	84,2231%
- Pegawai	1.054.200.000	892.742.500	84,6844%
- Barang Jasa	54.752.096.096	46.074.577.970	84,1513%
- Modal	1.000.903.750	877.464.400	87,6672%
BTL	46.951.292.000	44.596.214.264	94,9840%
- Pegawai	46.951.292.000	44.596.214.264	94,9840%
Total BL dan BTL	103.758.491.846	92.440.999.134	89,0925%

Tabel di atas menggambarkan bahwa struktur belanja BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebagian besar realisasinya adalah belanja langsung jika dibandingkan dengan belanja tidak langsungnya. Adapun komposisi belanja daerah BPSDM Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar 84,15%. Selanjutnya diikuti oleh Belanja pegawai sebesar 84,68% dan ditutup oleh Belanja Modal yaitu sebesar 87,66%.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BPSDM Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dikategorikan **tercapai,** karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2018 dalam Perjanjian Kinerja ada 4 indikator kinerja utama al. **Pesentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional** target 38,70% realisasi 38,70% capaian 100% (tercapai target), **Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial** target 54,58% realisasi 54,58% capaian 100% (tercapai target), **Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural** target 33,73% realisasi 33,54% capaian 99,54 (tidak tercapai target) **dan Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi** target 33,77% realisasi 34,77% capaian (101,01%).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2018 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDIHASTUTI

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januari 2018

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
ANIES BASWEDAN, Ph.D	BUDIHASTUTI
	NIP 195903151985032005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional	38,70%
		Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial	54,58%
		Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural	33,73%
		Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi	33,77%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%
		Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	100%
		Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu	100%
		Persentase progress tertib administrasi pengelolaan aset/ barang inventaris OPD	100%
		Jumlah updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi	20 dataset

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Kompetensi SDM	49.901.213.060	APBD

Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Anies Baswedan, Ph.D

Jakarta, 19 Januari 2018
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi DKI Jakarta,

Budihastudi
NIP 195903151985032005

LAMPIRAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Target		Realisasi		%
Program Pengembangan Kompetensi SDM									
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Input	:	Pagu Anggaran	2.578.743.000		2.203.416.400		85,45%
		Output	:	Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III	150	orang	150	orang	100,00%
	Mengacu pada Target IKU Diklat Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara	Outcome	:	Persentase alumni diklat kepemimpinan Tingkat III yang menerapkan inovasi/proyek perubahan	85	%	100	%	117,65%
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Input	:	Pagu Anggaran	4.015.308.000		3.267.626.300		81,38%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	300	orang	300	orang	100,00%
	Mengacu pada Target IKU Diklat Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara	Outcome	:	Persentase alumni diklat kepemimpinan Tingkat IV yang menerapkan inovasi/proyek perubahan	85	%	100	%	117,65%
3	Diklat Prajabatan Golongan	Input	:	Pagu Anggaran	7.937.150.000		6.721.546.500		84,68%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III (K1/K2)	2.520	orang	2.520	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase alumni Pelatihan Dasar yang mengaktualisasikan Nilai-Nilai Dasar PNS	100	%	100	%	100,00%
4	Diklat Capacity Building	Input	:	Pagu Anggaran	704.780.080		629.720.150		89,35%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Capacity Building	150	orang	150	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan manajerial yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
5	Diklat Hukum Konstruksi	Input	:	Pagu Anggaran	51.116.500		46.905.000		91,76%
		Output	:	Jumlah peserta diklat hukum konstruksi	30	orang	30	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan hukum konstruksi yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
6	Diklat Pengawas Konstruksi	Input	:	Pagu Anggaran	50.116.500		46.405.000		92,59%
		Output	:	Jumlah peserta diklat pengawas konstruksi	30	orang	30	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan Pengawas konstruksi yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
7	Diklat Manajemen BLUD	Input	:	Pagu Anggaran	152.923.000		141.015.000		92,21%
		Output	:	Jumlah peserta diklat manajemen BLUD	120	orang	120	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan Pengelolaan BLUD yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
8	Diklat Manajemen Bencana	Input	:	Pagu Anggaran	93.376.500		89.055.000		95,37%
		Output	:	Jumlah peserta diklat manajemen bencana	90	orang	90	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan Manajemen Bencana yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
9	Diklat Manajemen Sekolah (e-Learning)	Input	:	Pagu Anggaran	168.113.000		157.250.000		93,54%
		Output	:	Jumlah peserta diklat manajemen sekolah (e-leaarning)	300	orang	300	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan Manajemen Sekolah yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
10	Diklat Penataan Ruang	Input	:	Pagu Anggaran	96.151.500		92.380.000		96,08%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Penataan Ruang Daerah	60	orang	60	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan Penataan Ruang yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
11	Diklat Dasar Pol PP bagi Staf	Input	:	Pagu Anggaran	853.361.500		711.340.000		83,36%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Dasar Pol PP bagi	120	orang	120	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Target		Realisasi		%
Program Pengembangan Kompetensi SDM									
12	Diklat Pelayanan Terpadu	Input	:	Pagu Anggaran	170.763.000		160.925.000		94,24%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (e-learning)	300	orang	300	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan pelayanan terpadu yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
13	Diklat pengelolaan Barang Daerah	Input	:	Pagu Anggaran	819.650.500		664.222.000		81,04%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Pengelolaan	600	orang	600	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan pengelolaan milik Daerah yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
14	Diklat Bendahara Pengeluaran	Input	:	Pagu Anggaran	659.318.500		581.962.500		88,27%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Bendahara	420	orang	420	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan Bendahara Pengeluaran yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
15	Diklat Bendahara Penerimaan	Input	:	Pagu Anggaran	53.913.500		48.205.000		89,41%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Bendahara Penerimaan	30	orang	30	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan Bendahara Penerimaan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
16	DIklat Pengiriman PPNS	Input	:	Pagu Anggaran	3.315.191.500		3.071.580.000		92,65%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Pengiriman PPNS	150	orang	150	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan Penyidik PNS yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
17	Diklat Training of Courses	Input	:	Pagu Anggaran	59.903.500		56.080.000		93,62%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Training of Courses	30	orang	30	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan TOC yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
18	Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara	Input	:	Pagu Anggaran	51.539.500		48.455.000		94,02%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Penulisan Karya Tullis Ilmiah bagi Widyaiswara	30	orang	30	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase dihasilkan karya tulis oleh widyaiswara yang memenuhi kaidah ilmiah	100	%	100	%	100,00%
19	Diklat Teknis Pertanahan	Input	:	Pagu Anggaran	294.749.500		281.985.000		95,67%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Teknis Pertanahan	300	orang	300	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan Pertanahan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
20	Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan	Input	:	Pagu Anggaran	616.993.500		606.090.000		98,23%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan	60	orang	60	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan Dasar Kereta Api Perkotaan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
21	Diklat Keretaapi Perkotaan	Input	:	Pagu Anggaran	817.555.000		754.795.000		92,32%
		Output	:	Jumlah peserta Pengiriman Kediklatan	90	orang	90	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan Keretaapi Perkotaan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
22	Pengiriman kediklatan	Input	:	Pagu Anggaran	2.348.292.500		2.011.512.321		85,66%
		Output	:	Jumlah peserta Pengiriman Kediklatan	177	orang	177	orang	100,00%
		Outcome	:	Meningkatnya kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan SKPD	100	%	100	%	100,00%
23	Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis	Input	:	Pagu Anggaran	38.166.500		32.285.000		84,59%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis	30	orang	30	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan pengelolaan arsip Dinamis yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Target		Realisasi		%
Program Pengembangan Kompetensi SDM									
24	Diklat Komunikasi Publik	Input	:	Pagu Anggaran	60.256.500		59.070.000		98,03%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Komunikasi Publik	30	orang	30	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan komunikasi Publik yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
25	Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas	Input	:	Pagu Anggaran	1.204.520.500		782.869.000		64,99%
		Output	:	Jumlah peserta Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas	300	orang	300	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
26	Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual	Input	:	Pagu Anggaran	198.671.500		191.155.000		96,22%
		Output	:	Jumlah peserta diklat pengelolaan dan pelaporan keuangan berbasis akrual	150	orang	150	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan keuangan berbasis akrual yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
27	Diklat Manajemen SDM (e-Learning)	Input	:	Pagu Anggaran	170.763.000		165.360.000		96,84%
		Output	:	Jumlah peserta diklat manajemen SDM(e-learning)	300	orang	300	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan manajemen SDM yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
28	Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Learning)	Input	:	Pagu Anggaran	170.763.000		165.360.000		96,84%
		Output	:	Jumlah peserta diklat manajemen perencanaan pembangunan daerah(e-learning)	300	orang	300	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
29	Diklat Teknis Perundang-undangan	Input	:	Pagu Anggaran	346.811.500		331.265.000		95,52%
		Output	:	Jumlah peserta diklat teknis perundang-undangan	150	orang	150	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan teknis perundan-undangan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
30	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi	Input	:	Pagu Anggaran	611.161.500		597.840.000		97,82%
		Output	:	Jumlah peserta diklat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan ujian sertifikasi	450	orang	450	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
31	Diklat Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta Estate Manajemen (Blended e-Learning)	Input	:	Pagu Anggaran	315.261.500		285.015.000		90,41%
		Output	:	Jumlah peserta diklat teknis pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta estate manajemen (blended e-learning)	300	orang	300	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Target		Realisasi		%
Program Pengembangan Kompetensi SDM									
32	Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Input	:	Pagu Anggaran	106.159.500		101.922.000		96,01%
		Output	:	Jumlah Peserta Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	90	orang	90	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan SPIP yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
33	Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	Input	:	Pagu Anggaran	66.697.500		63.969.000		95,91%
		Output	:	Jumlah Peserta DIklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	90	orang	90	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan penataausahaan keuangan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
34	Diklat Pelayanan Prima (e-Learning)	Input	:	Pagu Anggaran	170.763.000		165.360.000		96,84%
		Output	:	Jumlah Peserta Diklat Pelayanan Prima (e-Learning)	300	orang	300	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan pelayanan prima yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
35	Diklat Keprotokolan	Input	:	Pagu Anggaran	274.461.500		255.190.000		92,98%
		Output	:	Jumlah Peserta Diklat Keprotokolan	150	orang	150	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan keprotokolan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
36	Diklat Bina Damai	Input	:	Pagu Anggaran	145.941.500		139.785.000		95,78%
		Output	:	Jumlah Peserta Diklat Bina Damai	150	orang	150	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan bina damai yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
37	Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum	Input	:	Pagu Anggaran	130.597.500		128.319.000		98,26%
		Output	:	Jumlah Peserta Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum	90	orang	90	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan penyelesaian sengketa hukum yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
38	Diklat Revolusi Mental	Input	:	Pagu Anggaran	448.541.500		360.045.000		80,27%
		Output	:	Jumlah Peserta Diklat Revolusi Mental	150	orang	150	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan revolusi mental yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
39	Kerjasama Kediklatan	Input	:	Pagu Anggaran	147.886.500		143.534.997		97,06%
		Output	:	Jumlah Pesera Diklat Kerjasama Kediklatan	750	orang	750	orang	100,00%
		Outcome	:	Persentase peserta pelatihan kerjasama kediklatan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan	100	%	100	%	100,00%
40	Seleksi Pegawai Tugas Belajar	Input	:	Pagu Anggaran	169.981.500		101.965.000		59,99%
		Output	:	Jumlah peserta seleksi pegawai tugas belajar	300	orang	216	orang	72,00%
		Outcome	:	Terpenuhinya kebutuhan SDM Aparatur yang berkualitas dan terstandar.	100	%	100	%	100,00%
41	Pengiriman Pegawai Tugas Belajar	Input	:	Pagu Anggaran	15.383.597.500		12.007.290.197		78,05%
		Output	:	Jumlah peserta pengiriman pegawai tugas belajar	101	orang	101	orang	100,00%
		Outcome	:	Bertambahnya pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan program studi yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100	%	100	%	100,00%
42	Penyusunan Kurikulum Diklat	Input	:	Pagu Anggaran	55.095.000		55.095.000		100,00%
		Output	:	Jumlah Kegiatan penyusunan kurikulum diklat	3	Kurikulum	3	Kurikulum	100,00%
		Outcome	:	Penggunaan kurikulum diklat dalam pelaksanaan diklat	100	%	100,00	%	100,00%
43	Penyusunan Modul Diklat	Input	:	Pagu Anggaran	163.890.000		163.884.000		100,00%
		Output	:	Tersedianya Modul Diklat	18	modul	18	modul	100,00%
		Outcome	:	penggunaan modul diklat dalam pelaksanaan diklat	100	%	66,67	%	66,67%

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Target		Realisasi		%
Program Pengembangan Kompetensi SDM									
44	Pengelolaan Sistem Informasi BPSDM	Input	:	Pagu Anggaran	291.775.000		202.075.000		69,26%
		Output	:	Jumlah pengelolaan system informasi BPSDM	12	bulan	12	bulan	100,00%
		Outcome	:	Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta	6	paket	6	paket	100,00%
45	Pengembangan e-Learning	Input	:	Pagu Anggaran	261.200.000		228.086.000		87,32%
		Output	:	Jumlah pengembangan e-learning	5	jenis	5	jenis	100,00%
		Outcome	:	Terlaksananya pelatihan berbasis e-learning dengan 5 jenis modul diklat	100	%	80	%	80,00%
46	Akreditasi Kediklatan	Input	:	Pagu Anggaran	60.691.500		60.115.000		99,05%
		Output	:	Jumlah akreditasi kediklatan	4	jenis diklat	4	jenis diklat	100,00%
		Outcome	:	Terakreditasinya diklat-diklat yang diajukan proses akreditasinya dari Instansi Pembina	100	%	100	%	100,00%
47	Penyusunan Analisa Kesenjangan Kompetensi(TNA)	Input	:	Pagu Anggaran	86.854.060		86.750.000		99,88%
		Output	:	Jumlah penyusunan analisa kesenjangan kompetensi (TNA)	1	dokumen	1	dokumen	100,00%
		Outcome	:	Digunakannya hasil analisis pengembangan kompetensi prioritas menjadi kebijakan Gubernur	1	dokumen	1	dokumen	100,00%
48	Penjaminan Mutu dan SMM ISO 9001:2015	Input	:	Pagu Anggaran	188.106.500		171.595.000		91,22%
		Output	:	Jumlah penjaminan mutu dan SMM ISO 9001:2015	4	SMM & ISO	4	SMM & ISO	100,00%
		Outcome	:	Persentase pelaksanaan penjaminan mutu pada 4 jenis SMM	100	%	100	%	100,00%
49	Knowledge Management	Input	:	Pagu Anggaran	133.131.500		131.915.000		99,09%
		Output	:	Jumlah Knowledge Management	5	CoP	5	CoP	100,00%
		Outcome	:	Dihasilkannya adopsi/adaptasi inovasi dalam *Community of Practice*	100	%	100	%	100,00%
50	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi	Input	:	Pagu Anggaran	987.758.000		911.747.450		92,30%
		Output	:	Jumlah pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi profesi	800	orang	814	orang	101,75%
		Outcome	:	peserta yang lulus uji kompetensi mampu melaksanakan fungsinya di SKPD yang bersangkutan	100	%	100	%	100,00%
51	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dalam Rangka Sertifikasi Profesi	Input	:	Pagu Anggaran	127.481.500		110.005.000		86,29%
		Output	:	Jumlah penyusunan standard kompetensi jabatan dalam rangka sertifikasi profesi	4	standar	4	standar	100,00%
		Outcome	:	digunakannya standar kompetensi jabatan untuk pelaksanaan sertifikasi profesi	100	%	100	%	100,00%
52	Pelaksanaan Klinik Kompetensi	Input	:	Pagu Anggaran	82.681.500		78.420.000		94,85%
		Output	:	Jumlah pelaksanaan klinik kompetensi	5	jenis	5	jenis	100,00%
		Outcome	:	Terimplementasinya klinik kompetensi pada SKPD pelaksana	100	%	100	%	100,00%

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 22 Agustus 2019

Nomor : 269/K/DJASN/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : Penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Kepada Yth.
Kepala BKD
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor: 8824/087.1 tanggal 8 Agustus 2019 perihal Penyampaian Data Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan data yang dikirimkan kepada kami setelah dilakukan penghitungan rata-rata masing-masing dimensi yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin diperoleh hasil sebagai berikut:

Instansi	Responden	Dimensi				Nilai	Kategori
		Kualifikasi (25%)	Kompetensi (40%)	Kinerja (30%)	Disiplin (5%)		
Pemrov DKI Jakarta	4939 pegawai	17%	26%	26%	5%	73%	Sedang

2. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jabatan ASN,

Aidu Tauhid
NIP. 19670210 199503 1 001

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kotak Pilihan

- Kegiatan
- Papan Koordinasi
- Pengajuan Koordinasi
- Bidang dan Seksi
- Peta Kegiatan
- Statistik Input
- Download

Koordinasi

Data Koordinasi masih kosong.

Monitoring dan Evaluasi

SKPD : 30302000 / **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kondisi Tanggal : 31 Desember 2018 jam 15:50:00 WIB

Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung | Progres Fisik | Progres Keuangan | Realisasi

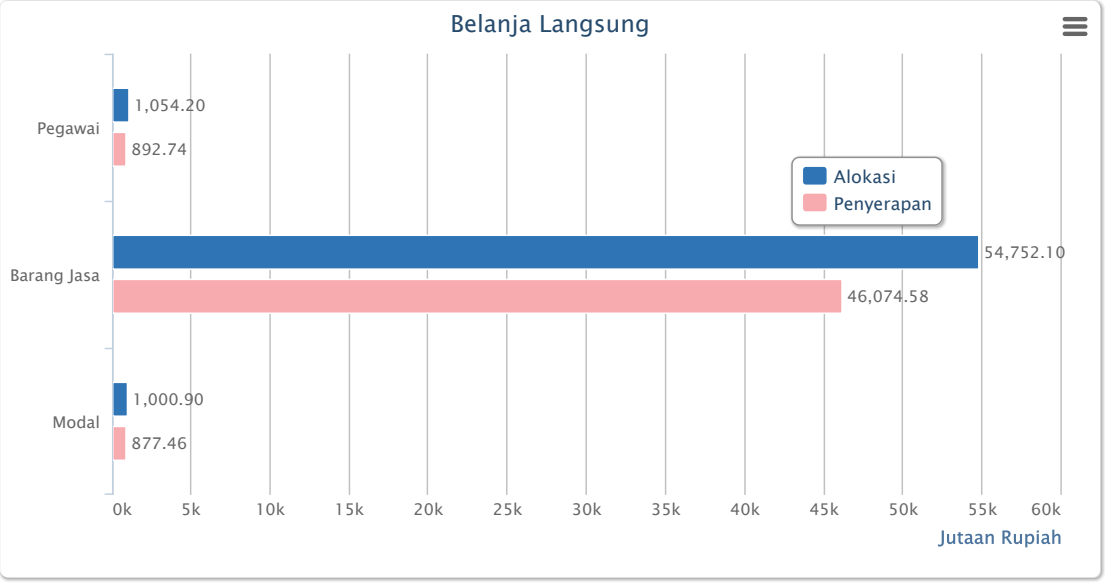

Data | Komparasi YoY

BL dan BTL berdasarkan Kategori Belanja:

Kategori Belanja	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (%)
BL	56.807.199.846	47.844.784.870	84,2231%
- Pegawai	1.054.200.000	892.742.500	84,6844%
- Barang Jasa	54.752.096.096	46.074.577.970	84,1513%
- Modal	1.000.903.750	877.464.400	87,6672%
BTL	46.951.292.000	44.596.214.264	94,9840%
- Pegawai	46.951.292.000	44.596.214.264	94,9840%
Total BL dan BTL	103.758.491.846	92.440.999.134	89,0925%

Target Serapan Perhitungan Sendiri

Bulan (1)	Total Target SPS (%) (2)	Target BTL (%) (3)	Target BL (%) (4)	Selisih Nilai (%) (5)	Realisasi (%) (6)
1	2,75 %	5,82 %	0,11 %	0,00 %	2,71 %
2	7,01 %	11,94 %	2,76 %	-0,00 %	7,50 %
3	17,40 %	18,36 %	16,58 %	0,00 %	15,95 %
4	29,22 %	24,78 %	33,05 %	0,00 %	25,66 %
5	37,57 %	31,20 %	43,05 %	0,00 %	33,33 %
6	44,78 %	38,65 %	50,05 %	0,00 %	40,42 %
7	55,40 %	50,35 %	59,74 %	0,00 %	49,59 %
8	64,05 %	57,58 %	69,62 %	0,00 %	58,73 %
9	71,96 %	64,00 %	78,82 %	0,00 %	64,48 %
10	82,57 %	78,54 %	85,89 %	0,00 %	73,98 %
11	88,52 %	85,59 %	90,93 %	0,00 %	81,61 %
12	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	89,09 %

Legenda
>= 50%
36% - 50%
26% - 35%
11% - 25%
1% - 10%

Keterangan	
(1)	Bulan

Keterangan	
(2)	Total Target SPS yang sudah diinput di E-TKD
(3)	Target BTL
(4)	Target BL merupakan penjumlahan target kegiatan
(5)	Selisih nilai yg merupakan perhitungan dari kolom (2) dikurangi kolom (3) dan (4)
(6)	Realisasi BL

Copyright © 2005 - 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
All rights reserved.

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kotak Pilihan

Kegiatan
Papan Koordinasi
Pengajuan Koordinasi
Bidang dan Seksi
Peta Kegiatan
Statistik Input
Download

Koordinasi

Data Koordinasi masih kosong.

Monitoring dan Evaluasi

SKPD : 30302000 / **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kondisi Tanggal : 31 Desember 2018 jam 15:50:00 WIB

Belanja Langsung | **Belanja Tidak Langsung** | Progres Fisik | Progres Keuangan | Realisasi

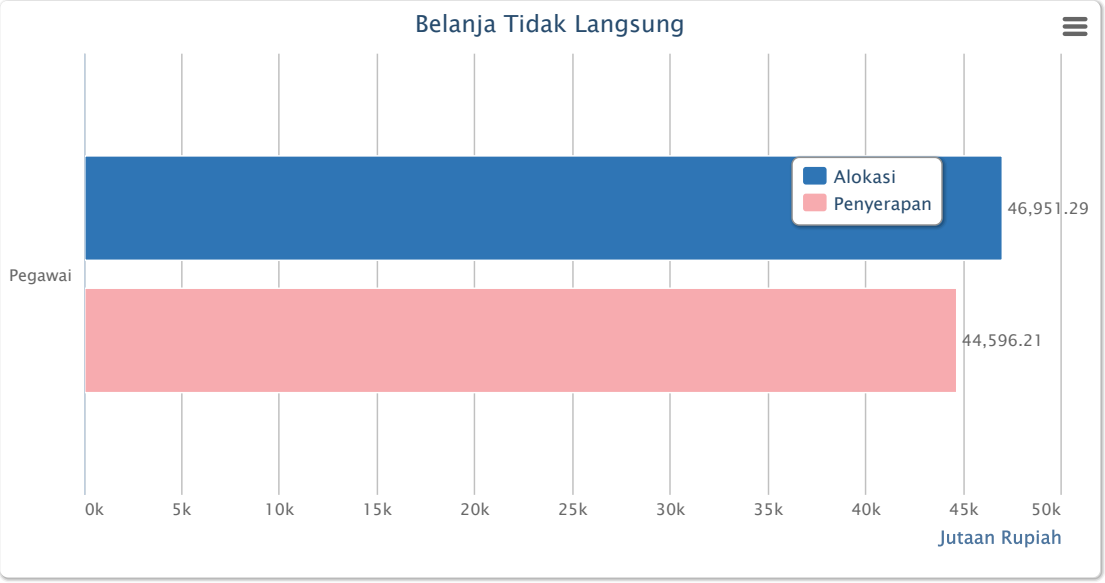

Data | Komparasi YoY

BL dan BTL berdasarkan Kategori Belanja:

Kategori Belanja	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (%)
BL	56.807.199.846	47.844.784.870	84,2231%
- Pegawai	1.054.200.000	892.742.500	84,6844%
- Barang Jasa	54.752.096.096	46.074.577.970	84,1513%
- Modal	1.000.903.750	877.464.400	87,6672%
BTL	46.951.292.000	44.596.214.264	94,9840%
- Pegawai	46.951.292.000	44.596.214.264	94,9840%
Total BL dan BTL	103.758.491.846	92.440.999.134	89,0925%

Target Serapan Perhitungan Sendiri

Bulan (1)	Total Target SPS (%) (2)	Target BTL (%) (3)	Target BL (%) (4)	Selisih Nilai (%) (5)	Realisasi (%) (6)
1	2,75 %	5,82 %	0,11 %	0,00 %	2,71 %
2	7,01 %	11,94 %	2,76 %	-0,00 %	7,50 %
3	17,40 %	18,36 %	16,58 %	0,00 %	15,95 %
4	29,22 %	24,78 %	33,05 %	0,00 %	25,66 %
5	37,57 %	31,20 %	43,05 %	0,00 %	33,33 %
6	44,78 %	38,65 %	50,05 %	0,00 %	40,42 %
7	55,40 %	50,35 %	59,74 %	0,00 %	49,59 %
8	64,05 %	57,58 %	69,62 %	0,00 %	58,73 %
9	71,96 %	64,00 %	78,82 %	0,00 %	64,48 %
10	82,57 %	78,54 %	85,89 %	0,00 %	73,98 %
11	88,52 %	85,59 %	90,93 %	0,00 %	81,61 %
12	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	89,09 %

Legenda
>= 50%
36% - 50%
26% - 35%
11% - 25%
1% - 10%

Keterangan	
(1)	Bulan

Keterangan	
(2)	Total Target SPS yang sudah diinput di E-TKD
(3)	Target BTL
(4)	Target BL merupakan penjumlahan target kegiatan
(5)	Selisih nilai yg merupakan perhitungan dari kolom (2) dikurangi kolom (3) dan (4)
(6)	Realisasi BL

Copyright © 2005 - 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
All rights reserved.

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kotak Pilihan

Kegiatan
Papan Koordinasi
Pengajuan Koordinasi
Bidang dan Seksi
Peta Kegiatan
Statistik Input
Download

Koordinasi

Data Koordinasi masih kosong.

Monitoring dan Evaluasi

SKPD : 30302000 / **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kondisi Tanggal : 31 Desember 2018 jam 15:50:00 WIB

Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung | **Progres Fisik** | Progres Keuangan | Realisasi

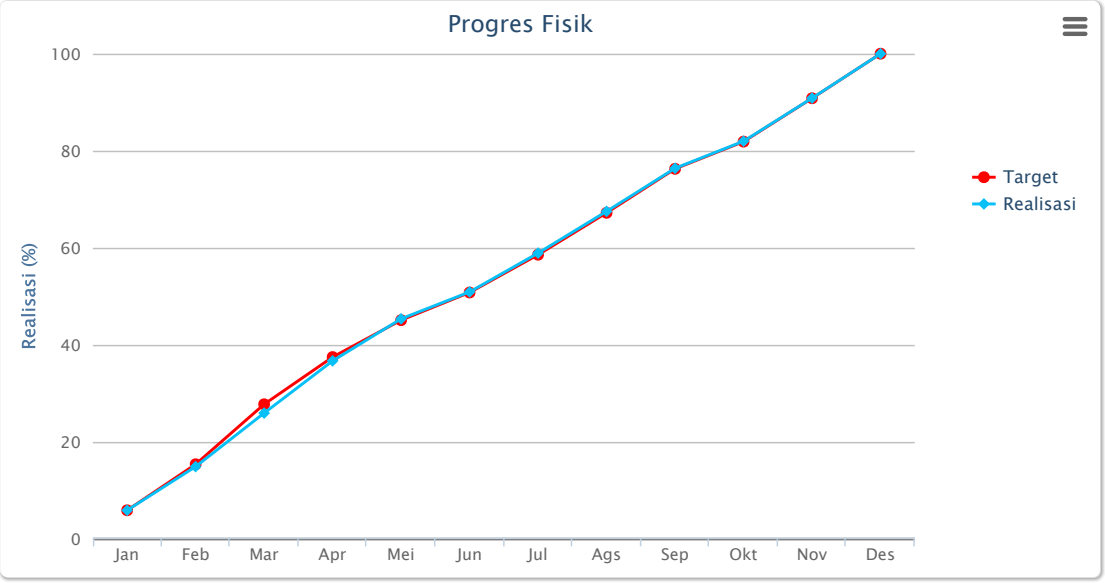

Data | Komparasi YoY

BL dan BTL berdasarkan Kategori Belanja:

Kategori Belanja	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (%)
BL	56.807.199.846	47.844.784.870	84,2231%
- Pegawai	1.054.200.000	892.742.500	84,6844%
- Barang Jasa	54.752.096.096	46.074.577.970	84,1513%
- Modal	1.000.903.750	877.464.400	87,6672%
BTL	46.951.292.000	44.596.214.264	94,9840%
- Pegawai	46.951.292.000	44.596.214.264	94,9840%
Total BL dan BTL	103.758.491.846	92.440.999.134	89,0925%

Target Serapan Perhitungan Sendiri

Bulan (1)	Total Target SPS (%) (2)	Target BTL (%) (3)	Target BL (%) (4)	Selisih Nilai (%) (5)	Realisasi (%) (6)
1	2,75 %	5,82 %	0,11 %	0,00 %	2,71 %
2	7,01 %	11,94 %	2,76 %	-0,00 %	7,50 %
3	17,40 %	18,36 %	16,58 %	0,00 %	15,95 %
4	29,22 %	24,78 %	33,05 %	0,00 %	25,66 %
5	37,57 %	31,20 %	43,05 %	0,00 %	33,33 %
6	44,78 %	38,65 %	50,05 %	0,00 %	40,42 %
7	55,40 %	50,35 %	59,74 %	0,00 %	49,59 %
8	64,05 %	57,58 %	69,62 %	0,00 %	58,73 %
9	71,96 %	64,00 %	78,82 %	0,00 %	64,48 %
10	82,57 %	78,54 %	85,89 %	0,00 %	73,98 %
11	88,52 %	85,59 %	90,93 %	0,00 %	81,61 %
12	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	89,09 %

Legenda
>= 50%
36% - 50%
26% - 35%
11% - 25%
1% - 10%

Keterangan	
(1)	Bulan

Keterangan	
(2)	Total Target SPS yang sudah diinput di E-TKD
(3)	Target BTL
(4)	Target BL merupakan penjumlahan target kegiatan
(5)	Selisih nilai yg merupakan perhitungan dari kolom (2) dikurangi kolom (3) dan (4)
(6)	Realisasi BL

Copyright © 2005 - 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
All rights reserved.

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kotak Pilihan

Kegiatan
Papan Koordinasi
Pengajuan Koordinasi
Bidang dan Seksi
Peta Kegiatan
Statistik Input
Download

Koordinasi

Data Koordinasi masih kosong.

Monitoring dan Evaluasi

SKPD : 30302000 / **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kondisi Tanggal : 31 Desember 2018 jam 15:50:00 WIB

Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung | Progres Fisik | **Progres Keuangan** | Realisasi

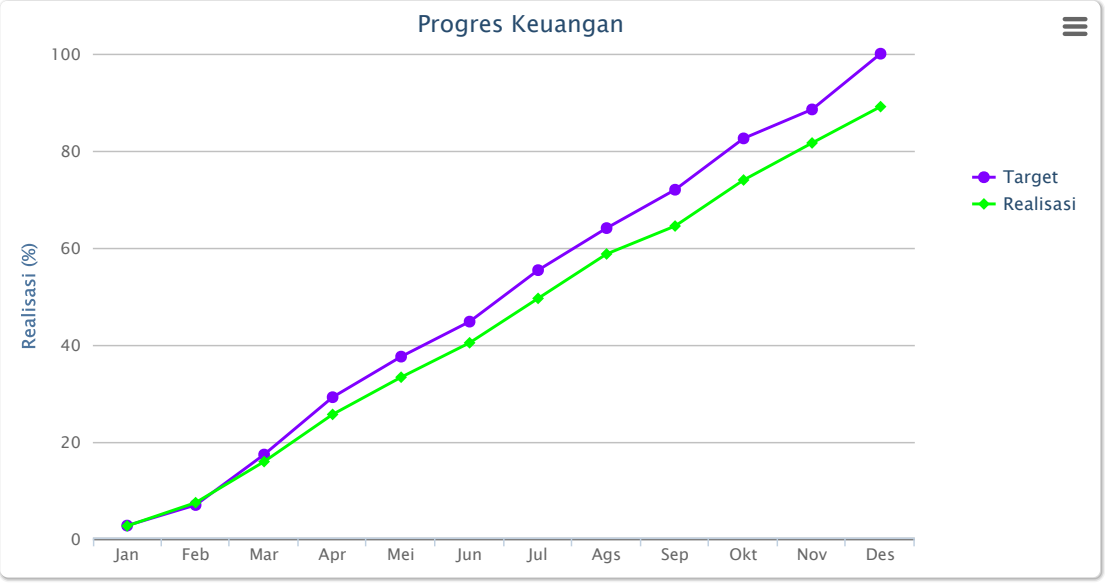

Data | Komparasi YoY

BL dan BTL berdasarkan Kategori Belanja:

Kategori Belanja	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (%)
BL	56.807.199.846	47.844.784.870	84,2231%
- Pegawai	1.054.200.000	892.742.500	84,6844%
- Barang Jasa	54.752.096.096	46.074.577.970	84,1513%
- Modal	1.000.903.750	877.464.400	87,6672%
BTL	46.951.292.000	44.596.214.264	94,9840%
- Pegawai	46.951.292.000	44.596.214.264	94,9840%
Total BL dan BTL	103.758.491.846	92.440.999.134	89,0925%

Target Serapan Perhitungan Sendiri

Bulan (1)	Total Target SPS (%) (2)	Target BTL (%) (3)	Target BL (%) (4)	Selisih Nilai (%) (5)	Realisasi (%) (6)
1	2,75 %	5,82 %	0,11 %	0,00 %	2,71 %
2	7,01 %	11,94 %	2,76 %	-0,00 %	7,50 %
3	17,40 %	18,36 %	16,58 %	0,00 %	15,95 %
4	29,22 %	24,78 %	33,05 %	0,00 %	25,66 %
5	37,57 %	31,20 %	43,05 %	0,00 %	33,33 %
6	44,78 %	38,65 %	50,05 %	0,00 %	40,42 %
7	55,40 %	50,35 %	59,74 %	0,00 %	49,59 %
8	64,05 %	57,58 %	69,62 %	0,00 %	58,73 %
9	71,96 %	64,00 %	78,82 %	0,00 %	64,48 %
10	82,57 %	78,54 %	85,89 %	0,00 %	73,98 %
11	88,52 %	85,59 %	90,93 %	0,00 %	81,61 %
12	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	89,09 %

Legenda
>= 50%
36% - 50%
26% - 35%
11% - 25%
1% - 10%

Keterangan	
(1)	Bulan

Keterangan	
(2)	Total Target SPS yang sudah diinput di E-TKD
(3)	Target BTL
(4)	Target BL merupakan penjumlahan target kegiatan
(5)	Selisih nilai yg merupakan perhitungan dari kolom (2) dikurangi kolom (3) dan (4)
(6)	Realisasi BL

Copyright © 2005 - 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
All rights reserved.

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kotak Pilihan

- Kegiatan
- Papan Koordinasi
- Pengajuan Koordinasi
- Bidang dan Seksi
- Peta Kegiatan
- Statistik Input
- Download

Koordinasi

Data Koordinasi masih kosong.

Monitoring dan Evaluasi

SKPD : 30302000 / **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kondisi Tanggal : 31 Desember 2018 jam 15:50:00 WIB

Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung | Progres Fisik | Progres Keuangan | **Realisasi**

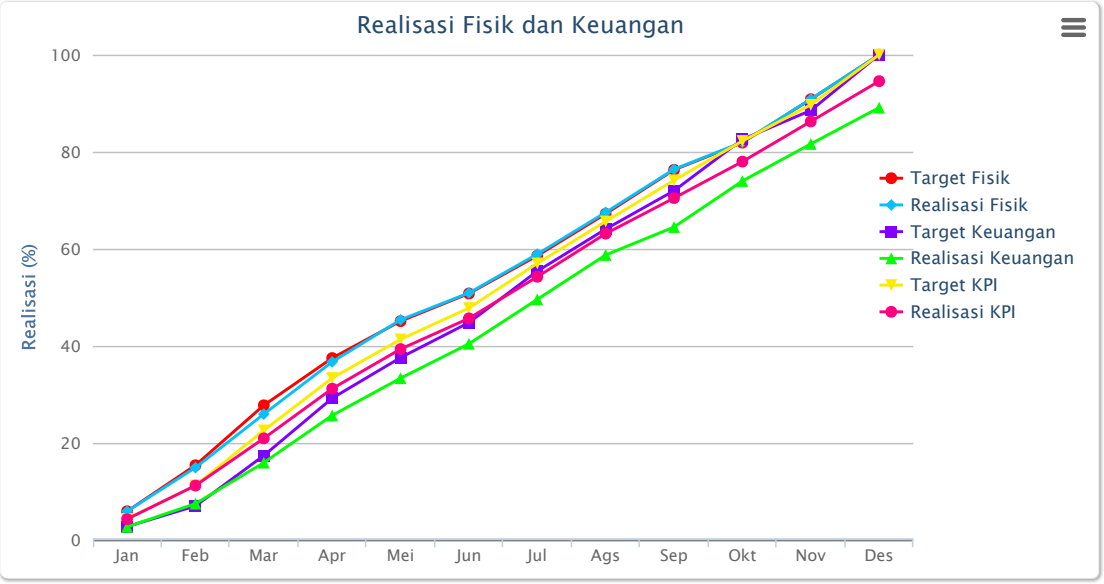

Data | Komparasi YoY

BL dan BTL berdasarkan Kategori Belanja:

Kategori Belanja	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (%)
BL	56.807.199.846	47.844.784.870	84,2231%
- Pegawai	1.054.200.000	892.742.500	84,6844%
- Barang Jasa	54.752.096.096	46.074.577.970	84,1513%
- Modal	1.000.903.750	877.464.400	87,6672%
BTL	46.951.292.000	44.596.214.264	94,9840%
- Pegawai	46.951.292.000	44.596.214.264	94,9840%
Total BL dan BTL	103.758.491.846	92.440.999.134	89,0925%

Target Serapan Perhitungan Sendiri

Bulan (1)	Total Target SPS (%) (2)	Target BTL (%) (3)	Target BL (%) (4)	Selisih Nilai (%) (5)	Realisasi (%) (6)
1	2,75 %	5,82 %	0,11 %	0,00 %	2,71 %
2	7,01 %	11,94 %	2,76 %	-0,00 %	7,50 %
3	17,40 %	18,36 %	16,58 %	0,00 %	15,95 %
4	29,22 %	24,78 %	33,05 %	0,00 %	25,66 %
5	37,57 %	31,20 %	43,05 %	0,00 %	33,33 %
6	44,78 %	38,65 %	50,05 %	0,00 %	40,42 %
7	55,40 %	50,35 %	59,74 %	0,00 %	49,59 %
8	64,05 %	57,58 %	69,62 %	0,00 %	58,73 %
9	71,96 %	64,00 %	78,82 %	0,00 %	64,48 %
10	82,57 %	78,54 %	85,89 %	0,00 %	73,98 %
11	88,52 %	85,59 %	90,93 %	0,00 %	81,61 %
12	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	89,09 %

Legenda
>= 50%
36% - 50%
26% - 35%
11% - 25%
1% - 10%

Keterangan	
(1)	Bulan

Keterangan	
(2)	Total Target SPS yang sudah diinput di E-TKD
(3)	Target BTL
(4)	Target BL merupakan penjumlahan target kegiatan
(5)	Selisih nilai yg merupakan perhitungan dari kolom (2) dikurangi kolom (3) dan (4)
(6)	Realisasi BL

Copyright © 2005 - 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
All rights reserved.

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan

SKPD : 30302000 / **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Legenda Capaian Kinerja				
91% - 100%	76% - 90%	66% - 75%	51% - 65%	<= 50%

Saring kegiatan: Saring

Ke halaman : 1 2

Program	No	Kegiatan	Ket	Anggaran	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Cek
3.03.05	Program Pengembangan Kompetensi SDM									
	004	Diklat Capacity Building		704.780.080	100,00%	89,35%	629.720.150	100,00%	100,00%	√
	005	Diklat Hukum Konstruksi		51.116.500	100,00%	91,76%	46.905.000	100,00%	100,00%	√
	006	Diklat Pengawas Konstruksi		50.116.500	100,00%	92,59%	46.405.000	100,00%	100,00%	√
	007	Diklat Manajemen BLUD		152.923.000	100,00%	92,21%	141.015.000	100,00%	100,00%	√
	008	Diklat Manajemen Bencana		93.376.500	100,00%	95,37%	89.055.000	100,00%	100,00%	√
	009	Diklat Manajemen Sekolah (e-Learning)		168.113.000	100,00%	93,54%	157.250.000	100,00%	100,00%	√
	010	Diklat Penataan Ruang Daerah		96.151.500	100,00%	96,08%	92.380.000	100,00%	100,00%	√
	011	Diklat Dasar Pol PP bagi Staf		853.361.500	100,00%	83,36%	711.340.000	100,00%	100,00%	√
	012	Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (e-Learning)		170.763.000	100,00%	94,24%	160.925.000	100,00%	100,00%	√
	013	Diklat pengelolaan Barang Daerah		819.650.500	100,00%	81,04%	664.222.000	100,00%	100,00%	√
	014	Diklat Bendahara Pengeluaran		659.318.500	100,00%	88,27%	581.962.500	100,00%	100,00%	√
	015	Diklat Bendahara Penerimaan		53.913.500	100,00%	89,41%	48.205.000	100,00%	100,00%	√
	016	DIklat Pengiriman PPNS		3.315.191.500	100,00%	92,65%	3.071.580.000	100,00%	100,00%	√
	017	Diklat Training of Courses		59.903.500	100,00%	93,62%	56.080.000	100,00%	100,00%	√
	018	Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara		51.539.500	100,00%	94,02%	48.455.000	100,00%	100,00%	√
	019	Diklat Teknis Pertanahan		294.749.500	100,00%	95,67%	281.985.000	100,00%	100,00%	√
	020	Diklat Keretaapi Perkotaan		817.555.000	100,00%	92,32%	754.795.000	100,00%	100,00%	√
	021	Pengiriman kediklatan		2.348.292.500	100,00%	85,66%	2.011.512.321	100,00%	100,00%	√
	022	Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis		38.166.500	100,00%	84,59%	32.285.000	100,00%	100,00%	√
	023	Diklat Komunikasi Publik		60.256.500	100,00%	98,03%	59.070.000	100,00%	100,00%	√
	024	Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual		198.671.500	100,00%	96,22%	191.155.000	100,00%	100,00%	√
	025	Diklat Manajemen SDM (e-Learning)		170.763.000	100,00%	96,84%	165.360.000	100,00%	100,00%	√
	026	Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Learning)		170.763.000	100,00%	96,84%	165.360.000	100,00%	100,00%	√
	027	Diklat Teknis Perundang-undangan		346.811.500	100,00%	95,52%	331.265.000	100,00%	100,00%	√
	029	DIklat Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta Estate Manajemen (Blended e-Learning)		315.261.500	100,00%	90,41%	285.015.000	100,00%	100,00%	√
	030	Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		106.159.500	100,00%	96,01%	101.922.000	100,00%	100,00%	√
	031	DIklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan		66.697.500	100,00%	95,91%	63.969.000	100,00%	100,00%	√
	032	Diklat Pelayanan Prima (e-Learning)		170.763.000	100,00%	96,84%	165.360.000	100,00%	100,00%	√
	033	Diklat Keprotokolan		274.461.500	100,00%	92,98%	255.190.000	100,00%	100,00%	√
	034	Diklat Bina Damai		145.941.500	100,00%	95,78%	139.785.000	100,00%	100,00%	√
	035	Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum		130.597.500	100,00%	98,26%	128.319.000	100,00%	100,00%	√
	036	Diklat Revolusi Mental		448.541.500	100,00%	80,27%	360.045.000	100,00%	100,00%	√
	037	Kerjasama Kediklatan		147.886.500	100,00%	97,06%	143.534.997	100,00%	100,00%	√
	038	Seleksi Pegawai Tugas Belajar		169.981.500	100,00%	59,99%	101.965.000	100,00%	100,00%	√
	040	Penyusunan Kurikulum Diklat		55.095.000	100,00%	100,00%	55.095.000	100,00%	100,00%	√
	041	Penyusunan Modul Diklat		163.890.000	100,00%	100,00%	163.884.000	100,00%	100,00%	√
	042	Pengelolaan Sistem Informasi BPSDM		291.775.000	100,00%	69,26%	202.075.000	100,00%	100,00%	√
	043	Pengembangan e-Learning		261.200.000	100,00%	87,32%	228.086.000	100,00%	100,00%	√
	044	Akreditasi Kediklatan		60.691.500	100,00%	99,05%	60.115.000	100,00%	100,00%	√
	045	Penyusunan Analisa Kesenjangan Kompetensi(TNA)		86.854.060	100,00%	99,88%	86.750.000	100,00%	100,00%	√
	046	Penjaminan Mutu dan SMM ISO 9001:2015		188.106.500	100,00%	91,22%	171.595.000	100,00%	100,00%	√

No	Kegiatan	Ket	Anggaran	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Cek
047	Knowledge Management		133.131.500	100,00%	99,09%	131.915.000	100,00%	100,00%	√
048	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi		987.758.000	100,00%	92,30%	911.747.450	100,00%	100,00%	√
049	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dalam Rangka Sertifikasi Profesi		127.481.500	100,00%	86,29%	110.005.000	100,00%	100,00%	√
050	Pelaksanaan Klinik Kompetensi		82.681.500	100,00%	94,85%	78.420.000	100,00%	100,00%	√
055	Pengiriman Pegawai Tugas Belajar		15.383.597.500	100,00%	78,05%	12.007.290.197	100,00%	100,00%	√
059	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi		611.161.500	100,00%	97,82%	597.840.000	100,00%	100,00%	√
060	Penyusunan Rencana Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta 2018 - 2022		76.810.000	100,00%	100,00%	76.810.000	100,00%	100,00%	√
061	Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan		616.993.500	100,00%	98,23%	606.090.000	100,00%	100,00%	√
063	Diklat Kepemimpinan Tingkat III		2.578.743.000	100,00%	85,45%	2.203.416.400	100,00%	100,00%	√

Ke halaman : **1** 2

Copyright © 2005 - 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
All rights reserved.

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan

SKPD : 30302000 / **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Legenda Capaian Kinerja				
91% - 100%	76% - 90%	66% - 75%	51% - 65%	<= 50%

Saring kegiatan: Saring

Ke halaman : 1 2

Program	No	Kegiatan	Ket	Anggaran	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Cek
3.03.05	Program Pengembangan Kompetensi SDM									
	064	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV		4.015.308.000	100,00%	81,38%	3.267.626.300	100,00%	100,00%	√
	065	Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III (K1/K2)		7.937.150.000	100,00%	84,68%	6.721.546.500	100,00%	100,00%	√
	066	Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas		1.204.520.500	100,00%	64,99%	782.869.000	100,00%	100,00%	√
3.03.06	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia									
	001	Penyediaan alat tulis kantor		192.801.461	100,00%	99,32%	191.498.505	100,00%	100,00%	√
	002	Penyediaan sewa mesin foto copy		215.658.300	100,00%	93,04%	200.640.000	100,00%	100,00%	√
	003	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		870.592.800	100,00%	68,68%	597.956.223	100,00%	100,00%	√
	004	Pengadaan Barang Pakai Habis Penunjang Pendidikan dan Pelatihan		215.758.675	100,00%	88,79%	191.565.000	100,00%	100,00%	√
	005	Pengadaan Jasa Pencucian Linen		118.888.000	100,00%	85,93%	102.164.700	100,00%	100,00%	√
	052	Pengadaan Modal Penunjang Pendidikan dan Pelatihan		1.000.903.750	100,00%	87,67%	877.464.400	100,00%	100,00%	√
	055	Penyediaan makanan dan minuman		281.221.160	100,00%	81,29%	228.605.598	100,00%	100,00%	√
	056	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja		388.379.200	100,00%	84,84%	329.483.000	100,00%	100,00%	√
	057	Penyediaan jasa administrasi keuangan		10.811.500	100,00%	88,24%	9.540.000	100,00%	100,00%	√
	058	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		97.971.368	100,00%	33,76%	33.079.200	100,00%	100,00%	√
	059	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor		1.054.824.460	100,00%	94,17%	993.329.309	100,00%	100,00%	√
	060	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor		1.327.537.155	100,00%	97,70%	1.297.021.440	100,00%	100,00%	√
	062	Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Diklat		1.996.219.665	100,00%	81,83%	1.633.428.500	100,00%	100,00%	√
	063	Penyediaan Jasa Bidang Teknis dan Penunjang		200.536.892	100,00%	90,77%	182.026.838	100,00%	100,00%	√
3.03.07	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia									
	001	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus		104.324.220	100,00%	100,00%	104.324.220	100,00%	100,00%	√
	002	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus		15.483.600	100,00%	72,71%	11.257.800	100,00%	100,00%	√
	004	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus		129.800.000	100,00%	88,47%	114.832.322	100,00%	100,00%	√

Ke halaman : 1 2

Copyright © 2005 - 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
All rights reserved.

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Nomor: 292/K.1/JFT.05.4

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia berdasarkan atas
Surat Keputusan Kepala LAN Nomor: 602/K.1/HKM.02.2/2018
memberikan penghargaan kepada:

Raden Yudhy Pradityo, Sp., SE., MM.

sebagai 10 Besar Widyaiswara Berprestasi Tingkat Nasional
Tahun 2018

Jakarta, 6 Agustus 2018
Kepala Lembaga Administrasi Negara

Adi Suryanto

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada :

Tarmujianto

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Sebagai :

Aggota Tim Psikososial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Dalam Rangka Penanganan Kondisi Psikologis Warga
Pasca Bencana di Lombok-Nusa Tenggara Barat
Terhitung mulai tanggal 25 Oktober s.d 3 November 2018

Jakarta, 29 November 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI

Nomor: BNSP-LSP-1200-ID
Masa Berlaku Hingga:
12 April 2021

SERTIFIKAT LISENSI

Dengan ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memberikan Lisensi kepada:

Lembaga Sertifikasi Profesi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

di

Jl. Abdul Muis No. 66 Gedung Teknis Lantai 6,
Jakarta 10160
Telp. : (021) 3865580, 3865581
Fax. : (021) 3865662

Sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua
Dengan ruang lingkup lisensi seperti dalam lampiran.
Lembaga Sertifikasi tersebut secara konsisten telah memenuhi kompetensinya sesuai dengan:
Pedoman BNSP 201, Pedoman BNSP 202 dan Pedoman BNSP 210

Jakarta, 12 April 2018

Ir. Sumarna F. Abdurahman, M.Sc

Ketua BNSP

BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Sertifikat ini diberikan berdasarkan pemenuhan lembaga sertifikasi profesi ini atas persyaratan sistem lisensi lembaga sertifikasi profesi yang ditetapkan BNSP. Pemberian sertifikat ini memberi hak kepada lembaga sertifikasi untuk melakukan uji kompetensi dan sertifikasi, serta untuk menggunakan tanda lisensi BNSP seperti yang tertera disini pada kop surat, iklan dan tujuan promosi lainnya. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan tanda izin tertulis dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.